

TANAH PERTEMUAN RAJA: SEJARAH PERNASKAHAN KERINCI 1370–1819 M

Uli Kozok

University of Hawai'i at Manoa, Amerika Serikat

Korespondensi: info@ulikozok.com

ABSTRACT

In the last 500 years, the Kerinci valley, while enjoying *de facto* independence, always acknowledged the sovereignty of either Jambi, Indrapura, or Minangkabau. This article examines manuscripts sent by the suzerains of the three kingdoms to the headmen (Depati) of Kerinci and puts them into a historical perspective with particular emphasis on the social and economical impact brought upon the society by the arrival of Islam and colonialism in central Sumatra suggesting that the legal system of Malayu-Jambi essentially remained the same while the fundamental changes in the field of politics and economy are to a large extent attributable to colonialism, and only to a lesser extent to the arrival of Islam. The article also questions existing theories regarding a pre-Islamic Malay manuscript tradition and argues that the emergence of a paper-based Malay manuscript tradition is intrinsically linked to the availability of European paper.

Keywords: *Jambi; Kerinci; Dharmasraya; Melayu; Sumatera; Islam; Colonial; Manuscript; History; Portugis; Belanda*

ABSTRAK

Selama 500 tahun terakhir, masyarakat Kerinci *de jure* mengakui kedaulatan Jambi, Indrapura, atau Minangkabau, namun *de facto* tetap mempertahankan kemerdekaannya. Artikel ini mengkaji naskah-naskah yang dikirimkan oleh para penguasa tiga kerajaan tersebut kepada para Depati di Kerinci dan menempatkannya dalam perspektif sejarah dengan penekanan khusus pada dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat Jambi dengan masuknya Islam dan kolonialisme di Jambi dan sekitarnya. Ternyata sistem hukum tidak berubah dengan kedatangan agama Islam, dan perubahan mendasar di bidang politik serta ekonomi yang terjadi setelah abad ke-16, terutama disebabkan oleh kedatangan bangsa penjajah dari Portugal, Inggris, dan Belanda. Artikel ini juga membahas teori-teori yang ada mengenai tradisi naskah Melayu pra-Islam dan menunjukkan bahwa tradisi pernaskahan Melayu sudah ada di zaman pra-Islam, tetapi baru marak setelah tersedia kertas dari Eropa.

Kata Kunci: *Jambi; Kerinci; Dharmasraya; Melayu; Sumatera; Islam; Kolonial; Naskah; Sejarah; Portugis; Belanda*

1. PENDAHULUAN

Ketika kepulauan Nusantara¹ mengalami transformasi dari budaya Hindu-Buddha ke Islam, terjadi perubahan mendasar di berbagai bidang yang diakibatkan bukan hanya karena masuknya peradaban Islam, tetapi juga karena kedatangan peradaban Eropa yang dipelopori oleh Portugis dan Belanda. Khususnya untuk Sumatera bagian tengah proses pengislaman dan kolonisasi terjadi pada saat yang sama, mulai dengan awal abad ke-16. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang mendarat di Nusantara, tepatnya di Melaka.

1 Karena cakupan geografis artikel ini adalah Alam Melayu maka di dalam artikel ini istilah Nusantara digunakan untuk wilayah yang termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan bagian selatan Thailand.

Kota yang terletak di Semenanjung Melayu ini direbut Portugis karena menjadi salah satu pelabuhan dan pusat perdagangan terpenting di Nusantara.

Ketika Portugis menaklukkan Melaka tahun 1511, sebagian penduduk Jambi sudah beragama Islam, tetapi baru pada tahun 1615 kerajaan ini resmi menjadi kesultanan. Dari Melaka Portugis berangkat untuk mencari pulau-pulau penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian timur, khususnya di kawasan kepulauan Maluku. Buah pala misalnya, pada waktu itu hanya terdapat di kepulauan Banda, dan menjadi salah satu komoditas perdagangan dengan harga yang tertinggi. Portugis menguasai jalur perdagangan rempah-rempah selama abad ke-16. Tahun 1595 Belanda melancarkan ekspedisi pertama ke Nusantara dan tahun 1640 mereka berhasil merebut Melaka dari tangan Portugis.

Di tengah-tengah kemelut pergulatan antara kedua kekuatan baru di Nusantara, ada daerah yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Jambi adalah wilayah yang awalnya diuntungkan karena menghasilkan komoditas baru seperti lada, tetapi di kemudian hari mengalami masa kehancuran yang mengakibatkan Jambi malah terbelah menjadi dua kerajaan yang saling bermusuhan. Sebagai negeri yang ekonominya tergantung pada perdagangan, Jambi Ilir sangat rentan terhadap perkembangan pasar produk perdagangannya sementara kawasan pedalaman di Jambi Ulu, termasuk Merangin dan Kerinci, tidak begitu dipengaruhi oleh naik turunnya ekonomi di ilir karena ekonominya terutama berbasis pertanian dan tidak terlalu tergantung pada arus perdagangan. Selain itu, mereka juga bisa mengekspor penghasilan mereka seperti emas ke Minangkabau.

Dua naskah kitab undang-undang yang disimpan oleh masyarakat desa Tanjung Tanah di Kerinci, Jambi, yang satunya ditulis sebelum dan yang satu lagi sesudah kedatangan Islam, mengisyaratkan bahwa masa transisi dari budaya Hindu-Buddha (pra-Eropa) ke Islam berlangsung secara berkesinambungan tanpa ada perubahan yang mendasar, baik dari segi stratifikasi sosial dan ketatanegaraan maupun ekonomi. Tampaknya bahwa peralihan dari zaman pra-Islam ke zaman Islam di Kerinci terjadi tanpa adanya perubahan yang signifikan. Karena terletak di dataran tinggi jauh dari kawasan pesisir, Kerinci relatif bebas dalam membentuk persekutuan dengan kerajaan di sekitarnya (Jambi, Minangkabau dan Inderapura). Selain itu Kerinci sudah memiliki lembaga kemasyarakatan yang kuat sebelum kedatangan peradaban Islam.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dua Kitab Undang-Undang dari Tanjung Tanah, Kerinci

Kedua naskah Tanjung Tanah, TK 214 dan TK215, sudah dibahas secara mendalam oleh Kozok (2006, 2015, 2023). Di dalam artikel ini informasi yang terkandung di dalam kedua naskah tersebut, ditambah oleh data sejumlah naskah lainnya serta informasi dari sumber-sumber sejarah, digunakan untuk merekonstruksi perubahan yang terjadi di Jambi, dan khususnya di Kerinci, di bidang sosial dan ekonomi selama masa peralihan antara zaman Buddha dan zaman Islam.

***Nītisārasamuccaya* – Kitab Undang-Undang dari Abad ke-14**

Tanjung Tanah (Kec. Danau Kerinci, Kab. Kerinci, Provinsi Jambi) adalah sebuah kampung yang terletak sekitar 15 km selatan dari Sungai Penuh di dalam Mendapo Seleman. Kampung kecil yang terletak di pantai utara Danau Kerinci menjadi terkenal

karena menyimpan naskah Melayu yang tertua. Naskah yang berjudul *Nītisārasamuccaya* ditulis di atas daluang, yaitu semacam kertas yang terbuat dari kulit kayu *Broussonetia papyrifera* yang dikenal sebagai *saeh* (bahasa Sunda) atau *glugu* (bahasa Jawa). Hingga kini, naskah *Nītisārasamuccaya* masih berada di Tanjung Tanah sebagai pusaka moyangnya. Usianya diketahui karena sebuah sampel telah diperiksa di sebuah laboratorium di Wellington, Selandia Baru (Kozok 2015, hlm. 52–57).

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Nītisārasamuccaya*, yang berasal dari bahasa Sanskerta), berarti ‘Ikhtisar Hakikat Kebijakan’ atau dengan bahasa yang lebih sederhana ‘kumpulan peraturan’, yaitu kitab undang-undang. *Nītisārasamuccaya* ditulis dengan aksara Sumatera Kuno yang juga dikenal sebagai aksara Malayu, yang hampir sama dengan aksara Jawa Kuno, dan berisikan berbagai undang-undang yang mengatur tata kehidupan di Kerinci (Kozok 2006, 2015). Naskah *Nītisārasamuccaya* untuk pertama kali dilihat oleh orang luar pada tahun 1941 ketika pegawai bahasa pemerintahan kolonial Dr. Petrus Voorhoeve menginventarisasi naskah-naskah di Kerinci di dalam sebuah buku stensilan dengan judul Tambo Kerinci (TK). *Nītisārasamuccaya* dicatatnya dengan nomor TK 214.

Selama perang dunia kedua buku stensilan Voorhoeve hilang, tetapi setelah lebih dari 30 tahun ditemukan kembali oleh peneliti Inggris C.W. Watson (1976, hlm. 40). Watson menitipkan salinan dari dokumen Tambo Kerinci kepada lembaga penelitian Belanda KITLV, namun tidak pernah dipublikasikan. Karena Voorhoeve pada waktu itu tidak dapat menentukan usia TK 214 maka untuk selanjutnya naskah *Nītisārasamuccaya* tidak menarik perhatian orang.

Pada tahun 2002 peneliti Jerman Uli Kozok berkunjung ke Tanjung Tanah karena mendengar dari narasumbernya bahwa di kampung tersebut ada buku yang ditulis di atas kulit kayu yang jarang sekali dapat ditemukan di Kerinci karena naskah Kerinci biasanya ditulis di atas bambu, tanduk, atau kertas. Kozok mengambil foto dari naskah TK 214 dan ia juga memperoleh sampel kecil yang dikirim kepada laboratorium dan menghasilkan umur radiokarbon yang menunjukkan bahwa pohon daluang ditebang antara tahun 1304 dan 1436 M atau sekitar 1370 M. Dengan demikian maka TK 214 dipastikan menjadi naskah Melayu tertua di dunia.

Dharmasraya

Nītisārasamuccaya ditulis bukan di Kerinci, melainkan di dalam Kerajaan Dharmasraya, yang kini menjadi kabupaten dengan ibu kotanya di Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Provinsi Sumatera Barat. Sungai Dareh dialiri oleh Batang Hari, salah satu sungai terbesar di Sumatera. Namun, di abad ke-13 dan ke-14 pusat kerajaan Dharmasraya tampaknya terletak sepuluh kilometer ke arah hilir (timur) di sebuah tempat yang oleh penduduk disebut Padang Roco ‘padang arca’ karena di sana sering ditemukan arca. Padang Roco yang terletak di sekitar Kampung Sungai Langsung, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya, dikelilingi oleh parit. Di lokasi ini terdapat beberapa candi beserta sebuah patung Bhairawa yang dulu berdiri di tebing Batang Hari, dan yang kini menjadi salah satu daya pikat Museum Nasional. Dengan tingginya 441 cm patung ini adalah patung terbesar di Asia Tenggara (Tjoa-Bonatz 2019, hlm. 39).

Selain daripada patung Bhairawa ditemukan pula di situ lapik (alas) arca Amoghapasa dengan dipahatkan empat baris tulisan dengan aksara Jawa Kuno dalam dua bahasa (Melayu dan Sanskerta). Teks Prasasti Padang Roco tersebut berbunyi:

Bahagia! Pada tahun Śaka 1208 [1286M] bulan Bādrawāda, hari pertama bulan naik, hari Māwulu wāge, hari Kamis, Wuku Madanḡungan, letak raja bintang di baratdaya tatkala itulah arca paduka Amoghapāśa lokaśwara dengan empat belas pengikut serta tujuh ratna permata dibawa dari Bhūmi Jāwa ke Swarnnabhūmi, supaya ditegakkan di Dharmmāśraya, sebagai hadiah Śrī Wiśwarūpa Kumāra. Untuk tujuan tersebut pāduka Śrī Mahārājādhirāja Kṛtanagara Wikrama Dharmmottunggadewa memerintahkan rakryān mahā-mantri Dyah Adwayabrahma, rakryān śirīkan Dyah Sugatabrahma dan samagat payānan hañ Dīpankaradāsa, rakryān damun Pu Wīra untuk menghantarkan pāduka Amoghapāśa. Semoga hadiah itu membuat gembira segenap rakyat di Bhūmi Mālayu, termasuk brāhmaṇa, ksatria, waiśa, sūdra dan terutama pusat segenap para āryya, Śrī Mahārāja Śrīmat Tribhuwanarāja Mauliwarmmadewa (Slamet Muljana 1981 hlm. 223).

Pada tahun 1347 M, Raja Adityawarman memindahkan arca Amoghapasa ke Rambahan, sementara lapiknya tetap di Padang Roco. Beliau menambah pula pahatan aksara pada bagian belakang patung Amoghapasa untuk menyatakan bahwa patung ini melambangkan dirinya. Dalam Prasasti Amoghapasa ini Adityawarman melukiskan kerajaannya sebagai “negeri yang memiliki emas, indah dengan kicauan burung dan gajah serta aroma hutan menyenangkan yang dihiasi oleh peri surga dengan kolam yang dikunjungi oleh Mātāṅginiśa dan Asura” (Kozok & van Reijn. 2010; Kern 1917, hlm. 172–173). Kedua prasasti ini kini disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta dengan nomor inventaris D.198-6468 (bagian alas) dan D.198-6469 (bagian arca).

Sekitar lima kilometer arah ke hilir, di antara Sungai Dareh dan Padang Roco terletak pula kompleks candi Pulau Sawah. Berdasarkan penemuan artefak maka Pulau Sawah didirikan antara abad ke-8 hingga abad ke-10 dan digunakan hingga abad ke-14. Di lokasi tersebut ditemukan lempengan emas dengan tulisan bahasa Sanskerta dan berbagai patung bergaya Hindu-Buddha mengisyaratkan bahwa pada kisaran abad ke-8 Dharmasraya sudah menjalin kontak dengan dunia internasional (Eka Asih 2022).

Tempat penulisan *Nītisārasamuccaya* disebut sebagai Waseban yang merupakan ejaan lama untuk Paseban. Paseban adalah balai yang digunakan untuk menghadap raja. Maka dapat disimpulkan bahwa naskah itu ditulis di dalam balai kerapatan di dalam istana Kerajaan Dharmasraya. Menarik untuk dicatat bahwa di tepi Batang Hari arah ke hilir, sekitar sekitar 80 km dari Dharmasraya terdapat sebuah kampung yang bernama Paseban, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, dan bersebelahan dengan Paseban ada pula desa yang bernama Balai Rajo. Boleh jadi pada zaman itu balai kerapatan Raja Dharmasraya memang berada di sekitar Paseban dan Balai Rajo.

Di kawasan antara Sungai Dareh dan Padang Roco banyak terdapat peninggalan sejarah. Sungai Dareh berarti ‘sungai deras’. Karena derasnya arus, maka kapal laut tidak bisa berlayar lagi arah ke hulu sehingga Dharmasraya tempat berlabuh terakhir untuk kapal besar yang masuk dari Selat Melaka lewat kota Jambi. Adityawarman menyebut bahwa negerinya memiliki banyak emas. Emas itu terutama berasal dari kawasan pertambangan emas di Kabupaten Tanah Datar dan di Kabupaten Sijunjung sekitar 80–180 kilometer dari Dharmasraya. Yang diperdagangkan dengan kota Jambi dan lalu ke luar negeri selain emas juga segala jenis getah, rotan, kayu, dan hasil hutan lainnya, sementara yang diimpor selain kebutuhan sehari-hari seperti garam dan besi, juga produk mewah seperti kain dari luar negeri, porselen Cina, dan sebagainya.

Sang Penulis *Nītisārasamuccaya*

Sang penulis *Nītisārasamuccaya* (TK 214) disebut dengan nama Kuja Ali. Kata *kuja* berasal dari sebutan Khoja yang di Indonesia digunakan sebagai gelar untuk merujuk pada orang Islam dari Asia Barat Daya. Di dalam kamus bahasa Melayu terdapat lema *koja* yang berarti ‘orang Islam’ dan juga ‘orang India selain Keling’, dan di dalam belasan hikayat terdapat gelar tersebut, biasanya dengan ejaan *khoja* dan terkadang juga *kodza*, tetapi juga dengan ejaan *kuja*, misalnya di dalam Hikayat Aceh (Teuku Iskandar 1958). Ada pula kue yang berasal dari India yang bernama *bolu kuja*.

Pada saat naskah *Nītisārasamuccaya* ditulis, Dharmasraya dan juga Kerinci masih beragama Buddha, tetapi ternyata Paduka Sri Maharaja Dharmasraya sudah memiliki seorang juru tulis yang beragama Islam. Alasan Maharaja Dharmasraya yang kemungkinan identik dengan Adityawarman memilih seorang Islam sebagai juru tulis di dalam kerajaan Buddha, barangkali karena selain aksara Malayu (Sumatera Kuno), Kuja Ali juga menguasai huruf Jawi (Arab Melayu) sehingga ia dapat berkomunikasi dengan dunia luar yang sebagian sudah memeluk agama Islam. Lagi pula, pada saat itu perdagangan di Asia mulai abad ke-9 dikuasai oleh saudagar Islam dari Cina, India, Persia, dan juga dari Jazirah Arab dan Timur Tengah. Mereka datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah yang dapat dijualnya dengan harga setinggi langit. Tentu saja saudagar Nusantara juga terlibat dalam arus perdagangan tersebut. Tidak lama kemudian para raja Nusantara mulai masuk Islam. Proses Islamisasi tersebut berlangsung selama kurang lebih 400 tahun, dari abad ke-12 hingga abad ke-16.

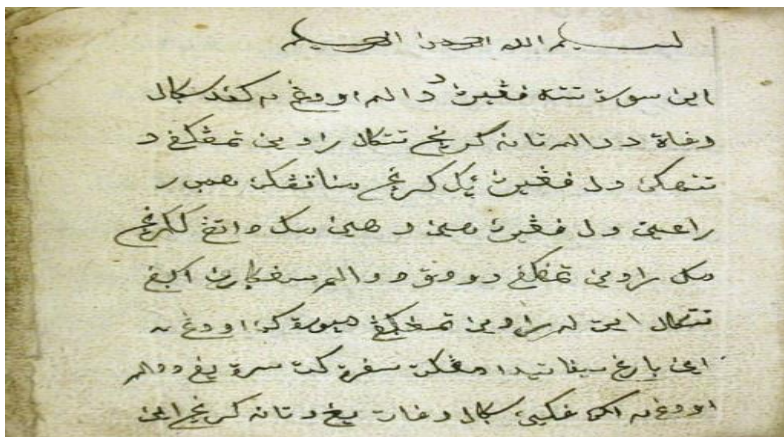
Kuja Ali bergelar Dipati. Kini, gelar Dipati masih digunakan tetapi dengan perubahan ejaan menjadi Depati. Gelar Dipati atau Depati di dahulu kala sangat umum digunakan di bagian selatan Sumatera, termasuk Bengkulu dan daerah Palembang, dan juga di Jawa, dan bahkan di India dan berbagai negara di Asia Tenggara karena asal muasal gelar itu dari bahasa Sanskerta *adhi-* (agung) + *pati* (tuan). Dengan demikian terdapat bentuk *Adhipati* (अधिपति) yang berarti ‘tuan besar’ atau ‘pangeran’. Di Jawa, Adipati adalah gelar kebangsawanan untuk orang yang menjabat sebagai kepala wilayah. Di Kerinci pun, gelar Adipati masih digunakan hingga abad ke-19 dengan arti yang sama dengan Depati. Misalnya dalam TK 86, sebuah surat dari Sultan Inderapura, dapat kita baca:

Akan tetapi itu surat bermula dihantar oleh Pemangku Sukarami ke tanah Penawa(r) kepada adipati yang di situ dan dari ta(nah Pe)nawa melainkan dihantar oleh suruhan adipati di situ lalu kepada adipati tanah undang² dan dari tanah undang² melainkan disuruh hantar ke tanah Hiang kepada adipati Batu Hampar, karena itu nan berjenjang naik, nang bertanggung turun, dan surat serta pedang itu tertinggal di rumah adipati Batu Hampar, karena adipati itu nan memanggil tiga helai kain yaitu adipati Biang Sari, adipati Rencung Talang, adipati Bendahara Langkat Kerinci Renda(h) Kerinci Tinggi. Dan apabila sudah selesai semuanya, maka adipati Batu Hampar berjalanlah ke tanah Rawang manapat di rumah Datuk Cahaya Dipati, sementara rapat berkumpul di hamparan besar (Voorhoeve 1941).

Pada saat kitab undang-undang *Nītisārasamuccaya* ditulis, di kawasan Nusantara belum ada kertas. Tampaknya kertas baru mulai digunakan di zaman Islam seiring dengan kedatangan bangsa Eropa.

Kitab Undang-Undang Tambo Kerinci No. 215

Naskah *Nītisārasamuccaya* hanya satu dari sepuluh naskah yang disimpan oleh penduduk Tanjung Tanah. Di antaranya terdapat enam naskah beraksara “Jawa yang terbuat dari daun lontar dan juga tiga naskah di kertas yang bertuliskan aksara Jawi (Arab Melayu)” (Voorhoeve 1941).



Gambar 1. TK 215, halaman 1

Salah satu di antara ketiga naskah Jawi tersebut diberi nomor TK 215 oleh Voorhoeve. Naskah tersebut kelihatan serba berbeda dengan TK 214. Bahannya kertas dan bukan daluang, aksaranya Jawi dan bukan Sumatera Kuno. Pada saat TK 214 ditulis belum ada kertas di Nusantara sehingga daluang digunakan sebagai media tulis, sementara ketika TK 215 ditulis kertas yang diimpor dari Eropa sudah secara umum digunakan. Bahasa yang digunakan di dalam TK 214 dan TK 215 sama-sama bahasa Melayu, tetapi sudah sangat berbeda karena TK 215 ditulis pada abad ke-17 atau ke-18, artinya ditulis 300–400 tahun setelah TK 214. Sayangnya, pada TK 215 tidak tercantum tanggal penulisannya, namun berdasarkan analisis paleografi yang dilakukan oleh Annabel Gallop dari British Library kemungkinan besar berasal dari abad ke-17 atau ke-18. Hal itu pun sejalan dengan kenyataan bahwa kebanyakan naskah Kerinci yang mencantumkan tanggal pembuatannya berasal dari abad ke-18.

Hubungan antara TK 214 dan TK 215

Baik TK 214 (*Nītisārasamuccaya*) maupun TK 215 merupakan kitab undang-undang. Walaupun kedua naskah sangat berbeda, terdapat pula banyak persamaan. Sekilas pandang isi TK 214 dan TK 215 seolah-olah berbeda jauh, terutama kalau kita membandingkan paragraf pertama dalam naskah TK 215 berawal dengan *bismillāhi r-rahmāni r-rahīm*, sedangkan TK 214 bermula dengan *om* yang diikuti dengan sebuah kalimat dalam bahasa Sanskerta, dan pada umumnya paragraf pertama cukup berbeda, namun terdapat pula persamaan. *Om* adalah suku kata suci dalam agama Hindu dan Buddha, dan boleh dikatakan memiliki fungsi yang mirip dengan *Basmalah* dalam agama Islam. Pada kedua naskah disebutkan bahwa undang-undang ditujukan untuk Kerinci, sang penguasa disebut, dan ada peringatan agar masyarakat mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh sang penguasa.

TK 214 memiliki 34 halaman dengan sekitar 1050 kata, sementara TK 215 berisikan 23 halaman dengan 1350 kata. TK 214 dapat dibagi menjadi 37 pasal, dan TK

215 43 pasal – 28 di antaranya hampir persis sama pada kedua naskahnya. Sebagai contoh, terdapat pada pasal yang menetapkan bahwa “*barang siapa yang naik ke rumah orang tanpa berseru dengan kuat, dan tanpa (membawa) suluh, boleh dibunuh*”. Perbedaannya terutama pada gaya bahasa. Misalnya *barang urang...* (barang siapa) diganti dengan *jika orang...*

TK 214: Barang urang naik ka rumah urang tida ia barseru barekuat barsuluh, bunuh.

TK 215: Jika orang datang malam tiada ia berseru atau tiada bersuluh bunuh orang itu.

Mengingat kedua teks memiliki persamaan yang sangat menonjol menimbulkan pertanyaan apakah TK 215 merupakan salinan langsung TK 214. Kita tidak tahu dengan pasti apakah di antara kedua teks tersebut masih ada teks ketiga sebagai teks perantara. Namun, kita dapat memastikan bahwa TK 215 merupakan salinan dari TK 214 bukan hanya karena begitu banyak persamaan, tetapi juga karena justru bagian-bagian teks yang sangat sulit dimengerti tidak diterjemahkan, diinterpretasikan secara bebas, atau dihapus. Tampaknya, penulis TK 215 menyalin pasal-pasal yang dimengertinya, sementara pasal-pasal yang memang sangat sulit untuk dipahami dihapus (misalnya bagian F, H, dan AK), atau diubah total (mis. bagian E dan L), mungkin karena penulis TK 215 tidak sepenuhnya memahami bahasa Melayu abad ke-14.

Ada pula beberapa kata yang salah disalin karena tidak dipahami. Bandingkan misalnya pasal berikut yang menetapkan bahwa maling telur ayam, telur itik, atau telur merpati akan ditumbuk tujuh kali. Lima kali ditumbuk oleh si penengah, dan dua kali oleh si pemilik telur tersebut, dan mukanya diusap tahi ayam kalau tidak sanggup membayar denda sebesar 2,5 emas.

TK 214: Maling telur hayam, itik, perapati ditumbuk tujuh tumbuk. Lima tumbuk urang manangahi, dua tumbuk tuhananya, mukanya dihusap dangan tahi hayam. Tida tarisi sakinan tengah tiga mas [2,5 emas] dandanya.

TK 215: Jika orang memaling telur itik depati tumbuk tujuh tumbuk. Lima tumbuk orang yang banyak, dua tumbuk dua tumbuk, mukanya dihusap dengan tahi ayam. Tiada ia hendak sepuluh emas akan dendanya.

Di sini penulis TK 215 tidak lagi mengerti kata *perapati* yang berasal dari bahasa Sanskerta *parapati* dan yang pada abad ke-18 sudah berubah menjadi *merpati*. Karena tidak mengerti *perapati* maka sang penulis secara keliru mengira bahwa yang dimaksud adalah telur itik milik depati. Di sini pun hukumannya sama, tetapi dendanya malah empat kali lipat. Apakah dendanya barangkali dinaikkan karena penulis salah mengira telur itik kepunyaan seorang Depati?

Perkembangan Bahasa Melayu antara Abad 14 dan Abad 18

Mengingat ada sekitar 350 tahun yang memisahkan TK 214 dan TK 215, maka tidak mengherankan jika bahasanya sudah banyak berbeda. Bahasa yang digunakan di TK 215 kurang-lebih sama dengan teks lainnya yang ditulis dengan bahasa Melayu Klasik sedangkan bahasa yang digunakan di TK 214 lebih tua daripada bahasa Melayu Klasik. Akan tetapi bahasa di TK 214 juga tidak setua bahasa Melayu Tua yang digunakan pada prasasti yang berasal dari abad ke-7 hingga abad ke-10 M. Karena ditulis di zaman pra-Islam maka di dalam naskah TK 214 tidak terdapat kata pinjam dari bahasa Arab, tetapi dalam TK 215 sudah terdapat sejumlah kata seperti *Allah*, *hukum*, dan *musyawarat*, dan

ada pula yang berasal dari bahasa Farsi (Persia) seperti *kawin*. Namun kedua naskah tetap didominasi oleh kata serapan dari bahasa Sanskerta. Ejaannya kadang-kadang sama dalam TK 214 dan 215, misalnya *bumi*, *cina*, *kata*, *raja*, *sahaya*. Namun, ejaan juga bisa berbeda: *araga* (TK214) /*harga* (TK215), *atawa/atau*, *danda/denda*, *kuraysani/kersani*, *manteri/menteri*, *sangkita/sengketa*.

Ada pula kata serapan dari bahasa Sanskerta yang hanya terdapat di TK 214, misalnya *cara*, *desa*, *gutera*, *kapala*, *paduka*, *kareja*, dan sebaliknya ada pula yang hanya terdapat di TK 215 seperti *negeri* atau *senjata*. Di antara kata Sanskerta di TK 214 terdapat beberapa yang sudah tidak lagi digunakan di TK 215 seperti kata hubung *punarapi* (Skt. *punar api* ‘lagi pula’), *atnya* (Skt *ājñā* ‘perintah’), *deretang* (Skt *dhrtam* ‘pegang kuat’), *gutera* (Skt. *gotra* ‘bangsawan’). Juga kata *punarapi* ‘lagi pula’ yang sering mendahului kata penghubung *jaka* di TK 214 tidak lagi digunakan dalam TK 215.

Selain dari bahasa Sanskerta ada satu lagi kata asal India, yakni kata Kerinci yang berasal dari bahasa Tamil, yang di dalam TK 214 masih memiliki ejaan aslinya Kurinci. Bunga *Kuriñci* (*Strobilanthes kunthiana*), yang hanya tumbuh di ketinggian 1.300–2.400 m dpl dan hanya mekar 12 tahun sekali, di dalam puisi Tamil melambangkan kawasan pegunungan serta cinta sejati. Perbedaan bahasa antara TK 214 dan TK 215 terdapat baik dari segi leksikon (kosa kata) maupun morfologi (imbuhan), sintaksis (susunan kalimat), maupun fonologi (bunyi bahasa).

Di TK 214 kata penghubung yang paling sering terdapat (14 kali) adalah *jaka*. Kata *jaka* masih digunakan di dalam bahasa Melayu hingga abad ke-17, misalnya di dalam Hikayat Banjar dan Kota Waringin yang berasal dari tahun 1663 (Ras 1968, hlm. 651). Hingga kini kata *jaka* juga masih terdapat di beberapa bahasa daerah seperti misalnya dalam bahasa Batak. Di TK 215 *jaka* sudah diganti menjadi ‘jika’ atau ‘jikalau’ yang digunakan 90 kali.

Pada TK 214 kata yang berawalan konsonan /b/ seperti *bunuh* berubah menjadi *mamunuh* jika didahului awalan *me-*. Hal itu memang biasa pada naskah yang berasal dari masa sebelum abad ke-18. Awalan *ba-* (*badusa*) atau *bar-* di TK 214 sudah berubah menjadi *ber-* di TK 215, misalnya *barsuluh* menjadi *bersuluh*.

Satu-satunya kata kuno yang masih tetap digunakan di TK 215 adalah *dua lapan* (delapan), yang berasal dari *dua alapan* - yang berarti ‘dua ambilan’ (sepuluh dikurangi dua). Dalam bahasa Melayu modern *dua alapan* menjadi *delapan*, atau dipendekkan lagi menjadi *lapan*. Namun pada naskah dari abad ke-17 dan 18 bentuk *dua lapan* masih sering ditemukan di samping bentuk modern *delapan* dan *lapan*.

Awalan pasif *ka-* pada kata *kadanda* (didenda) tidak lagi digunakan di TK 215 dan sudah diganti dengan awalan baku *di-*. Awalan *pa-* yang membentuk kata kerja seperti dalam kata *pahamba* (memperhamba) di TK 214, sudah berubah menjadi awalan *per-* di TK 215 dan imbuhan *ka-...-an* seperti pada kata *kapulangan* berubah menjadi *peN-...-an* (*pemulangan*). Awalan *sa-*, yang di TK 214, bila mendahului kata dasar berawalan vokal (*urang*, *ikor*) menjadi *surang* dan *sikur*, diganti dengan bentuk baku *se-* (*seorang*, *seekor*). Susunan kalimat yang sederhana di TK 214 diganti dengan kalimat yang lebih terperinci.

Tradisi Pernaskahan Melayu Pra-Islam

Aksara Sumatera Kuno berasal dari aksara Palawa, yakni sebuah aksara keturunan Brahmi Selatan yang digunakan di India Selatan. Aksara tersebut juga digunakan di

Indonesia, misalnya pada prasasti Yupa dari Kutai, Kalimantan Timur yang berasal dari abad ke-5, atau pada prasasti Talang Tuwo dari Sriwijaya (684 M). Kemudian aksara itu dimodifikasi sedikit agar lebih sesuai dengan menulis bunyi bahasa-bahasa Nusantara. Aksara baru yang mulai digunakan pada abad ke-8 ini kemudian dikenal sebagai aksara Kawi yang juga disebut Jawa Kuno atau Sumatera Kuno karena dipakai di seluruh Sumatera, Jawa, dan juga di Bali.

Naskah *Nītisārasamuccaya* (TK 214) bukan hanya naskah Melayu tertua di dunia, tetapi juga satu-satunya naskah yang ditulis dengan aksara Sumatera Kuno. Pada awalnya aksara keturunan Pelawa (Kawi) yang ada di Sumatera tidak dapat dibedakan dengan aksara Jawa Kuno dan oleh sebab itu juga sering disebut demikian. Akan tetapi lama-kelamaan varian yang digunakan di Sumatera mulai berubah bentuknya sehingga berbeda sedikit dengan aksara Jawa Kuno. Oleh sebab itu, maka peneliti Prancis Louis-Charles Damais menggunakan istilah “paléo-sumatranaise” untuk aksara Sumatera Kuno. Istilah tersebut masih sering digunakan, misalnya oleh Perret dan Griffith yang menyebutnya *Palaeosumatran script* yang, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti Sumatera Kuno. Sementara Willem van der Molen (2007) menyebutnya sebagai *Old Sumatran*, dan peneliti Belanda de Casparis (1975:29) mengusulkan agar aksara Sumatera Kuno disebut aksara Kawi, sementara khusus untuk aksara Kawi yang ditulis di masa Adityawarman ia memilih istilah aksara Malayu karena terutama digunakan di dalam kerajaan Malayu yang mencakup wilayah Jambi dan Sumatera Barat.

Prasasti yang lebih muda, seperti Prasasti Pananggahan di Barus (Griffiths, 2020:66), Minye Tujuh di Aceh (Molen 2007), dan Pengkalan Kempas di Negeri Sembilan (Casparis 1980) yang semuanya ditulis pada awal zaman Islam (akhir abad ke-14 hingga abad ke-15), juga masih ditulis dengan aksara Sumatera Kuno sehingga dapat disimpulkan bahwa ada masanya ketika abjad Arab Melayu (Jawi) sudah masuk, tetapi aksara pra-Islam masih tetap digunakan. Kesenambungan seperti itu sangat jelas kelihatan pada prasasti yang dwiaksara seperti Minye Tujuh (Aceh) dan Pengkalan Kempas (Negeri Sembilan).

Di beberapa daerah seperti di Aceh dan Minangkabau tidak ada lagi aksara asli Sumatera setelah abad ke-15, tetapi di daerah Batak, Kerinci, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung muncul aksara baru yang bernama ‘surat’ seperti Surat Sampulu Sia (Batak), Surat Incung (Kerinci), Surat Ulu (Bengkulu, Sumsel), dan Suhad Lampung. Kelima aksara tersebut berasal dari aksara Sumatera Kuno, dan naskah Tanjung Tanah TK 214 yang berdwiksara Malayu dan Incung mengisyaratkan bahwa aksara ‘surat’ sudah ada sejak abad ke-14. Di Kerinci, Bengkulu, Sumsel, Lampung, tetapi juga di Sunda dan Jawa malahan aksara ‘asli’ hidup berdampingan dengan huruf Jawi hingga abad ke-19.

TK 214 merupakan naskah Melayu yang paling tua, tetapi sebelumnya sudah ada teks yang ditulis pada bahan yang bertahan lebih lama seperti lempengan logam atau batu. Prasasti-prasasti tersebut ditulis dengan aksara yang sama-aksara Sumatera Kuno. Sebelum kertas diimpor dari Eropa dan Cina, berbagai bahan organik digunakan sebagai media tulis, termasuk bambu, tanduk kerbau dan kambing, kulit kayu, daun lontar, tulang dsb. Di dalam daerah tropis dengan hawa yang panas bahan organik cepat lapuk. Oleh sebab itu maka ada ilmuwan yang percaya bahwa sebelum kedatangan Islam belum ada tradisi pernaknakan dengan menggunakan bahan organik.

TK 214 membuktikan bahwa bahan organik sudah digunakan sebagai media tulis sebelum kedatangan Islam, dan juga bahwa bahan organik dapat bertahan lama di daerah tropis. Selain iklim, terutama hawa panas dengan kelembaban udara tinggi, ada berbagai faktor lain yang mengakibatkan naskah menjadi rusak atau lapuk. Serangga seperti rayap bisa memusnahkan sebuah naskah dalam tempo beberapa bulan saja. Penulis pernah membawa beberapa lembar daluang dari Indonesia, dan menyimpannya di dalam kantornya di Honolulu, Hawai'i yang ada pendingin ruangan yang hidup 24 jam. Entah serangan apa yang memakannya tidak diketahui, tetapi habis setahun hanya tinggal serbuk saja.

Sinar ultra-ungu matahari lama-kelamaan juga merusak bahan organik. Akan tetapi musuh terutama bukan hawa, serangga atau lingkungan, melainkan manusia itu sendiri. Penanganan yang tidak tepat, kelalaian dan kecerobohan dapat mengakibatkan naskah menjadi rusak atau bahkan hilang, misalnya bila dicuri orang, atau dianggap bukan barang berharga.

Dalam hal ini perlu kita puji kearifan lokal masyarakat Jambi yang menetapkan berbagai "peraturan" supaya naskah dapat bertahan lama dan disimpan dengan aman. Faktor yang paling penting ialah kepedulian terhadap naskah. Di Jambi naskah dianggap sebagai bagian dari pusaka mereka yang sakral. Oleh sebab itu pusaka hanya dapat dibuka pada saat-saat tertentu, yaitu pesta yang oleh orang Kerinci disebut sebagai *Kenduri Sko* (*ske* itu 'pusaka'). Upacara tersebut hanya diadakan sekali dalam sekian banyak tahun, terutama dalam hal penggantian pihak yang ditugaskan untuk menjaga koleksi pusaka. Barang pusaka diturunkan dari loteng dan naskah tanduk serta bambu dibersihkan dengan air limau. Pusaka umumnya bukan milik perseorangan melainkan milik masyarakat adat. Oleh sebab itu maka jarang sekali ada pusaka yang hilang karena dijual atau dicuri.

Ketika penulis bertanya kepada masyarakat Kerinci apa alasan maka barang pusaka selalu disimpan di dalam loteng maka jawabannya seolah-olah hanya berkaitan dengan adat: agar tidak dilangkahi orang. Loteng adalah bagian rumah yang paling sulit untuk diraih sehingga loteng tidak hanya menjadi tempat yang paling aman, tetapi juga tempat dengan kelembaban udara terendah. Udara di loteng memang cenderung panas, tetapi yang paling merusak bahan organik bukan hawa yang panas, tetapi naik-turunnya suhu udara. Oleh sebab itu maka pusaka pada umumnya dibalut dengan kain, dan lalu disimpan di dalam sebuah peti yang terbuat dari kayu. Dengan demikian rayap pun tidak mudah dapat mengaksesnya, apalagi kalau peti itu dioleskan dengan minyak serai.

Keadaan untuk melestarikan bahan organik paling ideal di daerah seperti Kerinci yang terletak di pegunungan dengan hawa yang relatif dingin dan dengan kelembaban udara lebih rendah daripada di daerah pesisir. Tetapi bukan hanya masyarakat Jambi yang memiliki kearifan lokal seperti itu. Orang Toraja suka menyimpan kain, terutama kain impor dari India, sebagai barang pusaka. Penanggalan radio-karbon yang dilakukan oleh Dr. Ruth Barnes dari Ashmolean Museum (Oxford, Inggris) menunjukkan bahwa kain asal India yang disimpan sebagai pusaka oleh penduduk Sulawesi Selatan berasal dari abad ke-14 hingga 16.

Filolog Inggris Russell Jones (1986, hlm. 139) beranggapan bahwa orang Melayu tidak memiliki tradisi pernaskahan sebelum kedatangan Islam. Teori yang sama awalnya dikemukakan oleh Friedrich (1854) dan belakangan ini juga oleh Abdullah (2000, hlm. 405). Jones mendasarkan teorinya pada kenyataan bahwa tradisi pernaskahan Melayu

ditulis dengan menggunakan huruf Arab-Melayu. Ia juga mengamati bahwa kata ‘baca’ berasal dari bahasa Sanskerta, sementara kata ‘tulis’ adalah kata Melayu asli (namun dengan arti asli ‘menggurat’ dan ‘menggambar’), sementara kata untuk alat tulis seperti ‘kertas’, ‘dakwat’ (tinta), dan ‘kalam’ berasal dari bahasa Arab. Selain itu Jones mengemukakan bahwa orang Jawa hingga abad ke-20 mempertahankan lontar sebagai media tulis dan tetap menggunakan aksara yang berasal dari India.

Teori Jones ditantang oleh filolog lainnya. Menurut Braginsky (2004, hlm. 47–49, 77–78) adanya prasasti dalam bahasa Melayu Tua dan dalam bahasa Sanskerta sejak abad ke-5 mengisyaratkan bahwa pada saat itu pun sudah ada tradisi pernaknahan pada media tulis organik. Teori Jones juga bertentangan dengan kenyataan bahwa di Nusantara sudah sejak dahulu kala terdapat istilah asli untuk ‘buku’ (dari bahasa Belanda) atau ‘pustaka’ (dari bahasa Sanskerta), khususnya untuk buku dari kulit kayu yang dilipat-lipat ada istilah *lepihan* dalam bahasa Jawa Kuno. Istilah yang sama juga digunakan untuk pustaka Batak (buku kulit kayu) yang disebut *lopian* atau *lapian* (Toba), *lapihin* (Pakpak), dan *lapihan* (Karo). Baik filolog Belanda Voorhoeve (1975:175,247) dan van der Tuuk (1861:478) sudah mengingatkan kita bahwa ada hubungan antara istilah untuk ‘buku lipat’ di daerah Batak dan di Jawa, sehingga Jákl (2016:183) malahan melihat adanya tradisi menulis dengan menggunakan buku kulit kayu di Jawa dan di Sumatera yang saling berhubungan: “*it is tempting to hypothesize that Javanese and Batak folding concertinas represent a manifestation of a shared book culture.*” Selain itu, Sriwijaya dan Jambi yang merupakan kerajaan agung yang menguasai wilayah yang cukup luas antara abad ke-7 hingga abad ke-14 merupakan pusat pembelajaran agama Buddha yang tentunya mesti memiliki tradisi menulis lengkap dengan sarana pendukung seperti perpustakaan (Farouk & Jones 2021, hlm. 155–156).

Di Sumatera, suku Kerinci, Rejang, Lebong, Bengkulu, Besemah (Pasemah), Ogan, Komerling, Serawai, dan Lampung menggunakan aksara mereka sendiri (yang merupakan keturunan aksara Sumatera Kuno), yaitu Surat Ulu (orang Kerinci menyebutnya Surat Incung). Suku-suku tersebut memiliki tradisi pernaknahan yang tua dengan menggunakan bambu, tanduk, dan kulit kayu sebagai media tulis. Kebanyakan naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu karena sebagian dari suku-suku tadi, seperti suku Kerinci, Ogan, atau Pasemah memang termasuk suku Melayu dan mereka berbahasa Melayu. Namun suku-suku yang memiliki bahasa sendiri seperti Rejang atau Lampung, tetap juga menggunakan bahasa Melayu dalam tradisi pernaknahan mereka.

Teori bahwa orang Melayu tidak memiliki tradisi pernaknahan sebelum kedatangan Islam juga ditolak oleh A. Teeuw. Beliau menulis bahwa “*particularities [in the Jawi script] can only be explained as a continuation of a similar spelling in Indian writing*” (Teeuw 1959, hlm. 152). Dalam hal ini “Indian writing” yang dimaksud oleh Teeuw tentu aksara Kawi (Sumatera Kuno). Dengan demikian, huruf Jawi tidak semata-mata dipinjam dari huruf Persia-Arab, melainkan diubahsesuaikan dengan fonologi bahasa Melayu. Bagi juru tulis Melayu, huruf Jawi bukanlah tulisan pertama yang mereka pelajari. Kata pakar bahasa Melayu Ulrich Kratz: “*One can assume that those developing the Jawi script for use with Malay had been familiar with the Pallava script and some of its South-East Asian variants*” (Kratz 2002, hlm. 23). Filolog Belanda de Casparis (1975, hlm. 73) juga mendukung teori bahwa adanya kesinambungan di dalam sejarah tulis di Alam Melayu dari zaman Hindu-Buddha ke zaman Islam.

TK 214 memperkuat teori Teeuw, Kratz dan de Casparis. Kuja Ali yang disebut sebagai juru tulis *Nitisārasamuccaya* beragama Islam. Sebagai orang Islam, selain aksara Melayu ia tentu saja juga menguasai tulisan Jawi. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa di Alam Melayu sudah ada tradisi pernaskahan sebelum kedatangan agama Islam dan bahwa ada kesinambungan antara kedua tradisi tersebut.

Sejarah Jambi dan Kerinci

Jambi di Zaman Buddha

Kini Jambi merupakan sebuah provinsi yang relatif terpencil di Indonesia, tetapi di dahulu kala Jambi merupakan salah satu pelabuhan penting di Selat Melaka yang menghubungkan Eropa, Timur Tengah, dan Asia Selatan dengan Cina, Jawa, dan Kepulauan Maluku yang tersohor sebagai daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia sejak zaman dahulu. Secara kasar Provinsi Jambi dapat dibagi menjadi tiga daerah geografis: daerah pesisir, kaki gunung, dan pegunungan yang juga kerap disebut Jambi Ilir, Jambi Ulu, dan Kerinci. Masing-masing daerah memiliki corak khas dari segi budaya dan bahasa, tetapi penduduk asli Jambi semua memiliki budaya dan bahasa berbasis Melayu. Walaupun berbahasa Melayu dan beragama Islam, penduduk Jambi tidak seragam tetapi terdiri atas berbagai suku. Kemajemukan penduduk Jambi dan sulitnya meraih daerah ulu dari ilir dari dahulu kala merupakan kendala bagi Kesultanan Jambi untuk memerintah rakyatnya di kawasan hulu.

Sejak kira-kira 500 tahun yang lalu penduduk Jambi beragama Islam, tetapi sebelumnya selama kurun waktu sekitar 1500 tahun orang Jambi beragama Buddha yang bercampur dengan unsur Hindu. Masyarakat Melayu sejak dahulu kala sudah menjadi pelaut ulung yang terlibat di dalam perdagangan internasional. Sekitar 1000 tahun yang lalu suku Melayu malahan sempat berlayar sampai ke Madagaskar di Afrika sehingga sebagian bangsa Malagasy hingga sekarang masih memiliki DNA khas Nusantara dan bahasanya pun berasal dari Indonesia (Adelaar 2017).

Dalam perjalanan ke India untuk mempelajari agama Buddha, seorang biksu asal Cina bernama Yijing (I-Tsing) 義淨 (635–713 M) dua kali singgah di sebuah kota di Moluoyu/Moluoyou” 末羅瑜/末羅遊. Yijing menulis bahwa para biksu di Melayu mempelajari dan meneliti segala sesuatu yang juga dipelajari di Madhyadesha (India). Inilah pertama kali Melayu disebut. Sebagian sejarawan beranggapan bahwa Moluoyu adalah Jambi. Selain bahasa Sanskerta Yijing juga mempelajari bahasa Melayu, dan menulis tentang tempat yang ia kunjungi dan yang ia namakan Sri-Bhoga:

Di dalam Kota Bhoga yang dikelilingi tembok pertahanan menetap lebih dari seribu biksu Buddha yang datang ke sana untuk belajar. Semua mata pelajaran yang juga diajarkan di India, tersedia di sini. Peraturan dan upacara pun persis sama. Bila seorang biksu asal Cina hendak berjalan ke Barat (India) untuk membaca kitab suci dan mendengarkan (ceramah), hendaknya mereka belajar di sini dulu selama satu atau dua tahun (Takasusu 1896, hlm. xxxiv).

Di tepi Batang Hari, sungai terbesar di Sumatera, sekitar 30 km arah ke hulu dari Kota Jambi terdapat situs arkeologi Muara Jambi yang menjadi ibu kota Kerajaan Melayu. Di dalam wilayah dengan luas sekitar 4.000 hektar terdapat 84 candi Buddha. Di Muara Jambi dan di sekitarnya ditemukan porselen Cina dari abad ke-9 hingga abad ke-

13 (Miksic 2011) yang membuktikan bahwa Muara Jambi digunakan secara berkesinambungan selama sedikitnya 400 tahun. Dengan demikian, Muara Jambi (dan juga Dharmasraya yang sudah disebut di atas) merupakan situs yang bukan hanya berskala nasional, tetapi internasional, dan menjadi salah satu tempat terkemuka yang menarik biksu dari luar negeri untuk mempelajari agama Buddha dan segala macam ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, maka Muara Jambi juga kerap dijuluki sebagai universitas tertua di Nusantara.

Pusat perdagangan seperti Jambi ada di mana-mana di Alam Melayu. Yang paling terkenal selain Melayu-Jambi adalah Sriwijaya. Pusatnya berada di sekitar Palembang, tetapi di berbagai tempat terdapat kota yang pernah dikuasai Sriwijaya dan yang terlibat dalam perdagangan antarabangsa. Di antaranya adalah Lembah Bujang (Kedah), Takuapa di Ko-kho Khau (Patani), Chaiya, dan Satingphra di Thailand. Penelitian arkeologi yang dilakukan di empat lokasi ini menghasilkan bukti adanya pemukiman yang relatif besar dikelilingi tembok pertahanan dan yang dihuni selama kurun waktu yang lama mulai pada sekitar abad ke-5. Keempat kota tersebut terletak di pesisir, dan penemuan arkeologis seperti candi, patung Hindu dan Buddha, tembikar dan manik-manik kaca dari Tiongkok dan Timur Tengah membuktikan bahwa di Alam Melayu sejak 1500 tahun yang lalu sudah terdapat kota internasional dengan penduduk yang majemuk (Nik Hassan Shuhaimi 1993, hlm. 64). Kita tidak tahu berapa penduduk ibu kota Melayu-Jambi pada saat itu, tetapi tentu lebih ramai daripada 600 jiwa yang menempati kota Jambi pada tahun 1830 (Locher-Scholten 2004, hlm. 49).

Jambi dan Kerinci Abad XVI–XVIII

Di beberapa daerah di Indonesia dan Malaysia agama Islam sudah ada sebelum kedatangan Eropa, tetapi Islam baru tersebar secara cepat dan merata serentak dengan kedatangan Portugis yang disusul Belanda. Schrieke (1955–1957) malah berkeyakinan bahwa kedatangan orang Eropa mempercepat persebaran agama Islam, dan teori ini juga didukung oleh Azyumardi Azra (2008).

Hingga pertengahan abad ke-15 Jambi masih sepi dari tinggalan artefak dan bukti kesejarahan Islam. Dengan merosotnya Majapahit pada abad ke-16, perniagaan di Jambi semakin meningkat. Tahun 1511 Melaka jatuh ke tangan Portugis yang mulai menjalin hubungan dengan Jambi terutama dalam rangka perdagangan lada yang pada saat itu dikendalikan Portugis. Pada abad ke-16 lada dibudidayakan secara luas di Jambi Hulu, dan seiring dengan kebangkitan ekonomi, pengaruh Islam pun menjadi semakin kuat karena perdagangan di Asia pada saat itu didominasi oleh saudagar yang beragama Islam.

Baru pada tahun 1615 Jambi secara resmi menjadi kesultanan. Tidak lama kemudian, pada abad ke-17, Islam juga mulai dikenal di kalangan istana Pagaruyung di Minangkabau. Diduga bahwa Islam masuk ke Kerinci dari Jambi, Minangkabau, atau barangkali juga dari Inderapura. Dengan kedatangan Islam orang Melayu juga mendapatkan aksara baru yaitu huruf Jawi yang merupakan tulisan Persia-Arab yang dimodifikasi sesuai dengan keperluan bahasa Melayu. Tulisan Jawi yang paling tua ditemukan di Malaysia dan dipahat pada Batu Bersurat Terengganu (1303 M). Seiring dengan masuknya huruf Jawi datang pula media tulis baru di Nusantara yaitu kertas.

Kertas untuk pertama kali ditemukan di Cina pada abad pertama Masehi, dan pada abad ke-8 tersebar ke daerah Arab, dan mulai abad ke-11 kertas juga mulai dibuat di Eropa. Hampir semua naskah beraksara Jawi menggunakan kertas Eropa sebagai media

tulis. Bahkan surat Sultan Ternate kepada Raja Portugal yang bertarikh 1521 dan 1522 M sudah menggunakan kertas Eropa (Jones 1993, hlm. 477). Dari catatan VOC kita mengetahui bahwa kapal dari Belanda membawa kertas ke Jambi dan Bantam pada tahun 1632 M (Jones 1993, hlm. 488; Farouk Yahya & Jones 2021, hlm. 207). Menariknya, hampir semua naskah yang beraksarakan Jawi (Arab Melayu) ditulis bukan di atas kertas buatan Arab atau Persia melainkan di atas kertas buatan Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi penaskahan Islam di Nusantara baru mulai marak setelah kertas Eropa tersedia sebagai komoditas perdagangan.

Semenjak awal abad ke-16 terdapat dua budaya dan dua peradaban yang mentransformasikan masyarakat Melayu pada saat yang sama: peradaban Islam dan peradaban Eropa. Perubahan terjadi di berbagai bidang: agama, teknologi, kemasyarakatan, dan juga di bidang ekonomi termasuk pertanian dan perniagaan yang akan dibahas di dalam bagian berikut.

Selama ratusan tahun Palembang dan Melayu-Jambi menjadi kerajaan Melayu terpenting di Nusantara. Pada awal abad ke-15 Melaka menjadi kerajaan Islam dan pusat peradaban Melayu pindah dari Sumatera ke Semenanjung Melayu. Melaka menjadi pusat perdagangan utama dan sekaligus kota terbesar di Asia Tenggara. Seiring dengan kejayaan Melaka, bahasa Melayu pun naik daun dan menjadi bahasa terpenting di Asia Tenggara dan digunakan secara luas di dalam pergaulan antar etnik dan bahkan antarabangsa. Diilhami oleh tradisi penaskahan Arab, orang Melayu mengembangkan tradisi penaskahan mereka sendiri.

Bahasa Melayu juga menjadi wahana untuk menyebarkan baik agama Islam maupun agama Nasrani, dan orang Eropa menggunakan bahasa Melayu sebagai media komunikasi dan administrasi bukan hanya di daerah yang berbahasa Melayu, tetapi di seluruh Hindia-Belanda. Bahasa Melayu kini menjadi bahasa nasional di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura dengan jumlah penutur sekitar 250 juta orang. Bahasa Melayu juga memiliki sejarah yang sangat lama. Prasasti tertua berbahasa Melayu adalah prasasti Kedukan Bukit dari Sumatera Selatan yang bertarikh 1 Mei 683 M.

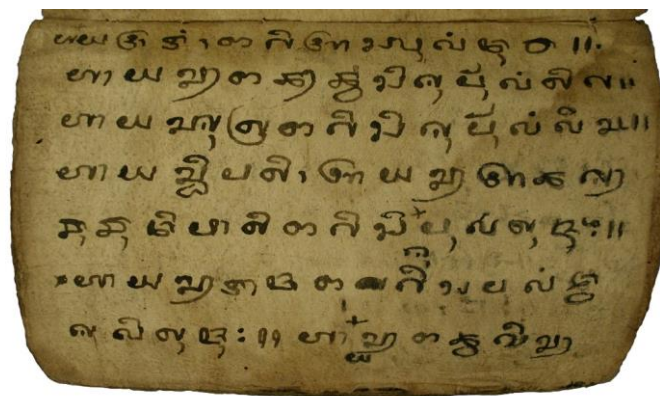
Segala pembaharuan yang datang bersama dengan agama Islam dan dengan kedatangan orang Eropa ini memiliki dampak pada ekonomi dan kehidupan bermasyarakat bahkan di daerah yang relatif terpencil seperti Kerinci. Pembaharuan tersebut memengaruhi tiap sendi kemasyarakatan. Namun, bila kita mengkaji kedua kitab undang-undang dari Tanjung Tanah, TK 214 dan TK 215, maka yang paling menonjol justru kesinambungan dari zaman Hindu-Buddha ke zaman Islam. Tampaknya bahwa perubahan dari zaman pra-Islam ke zaman Islam, terutama di daerah yang relatif kecil dan yang ekonominya berbasis pertanian seperti Kerinci, berlangsung tanpa adanya perubahan ketatanegaraan atau keadaan sosial secara mendasar. Yang terjadi bukan revolusi tetapi evolusi.

Stratifikasi Sosial dan Perubahan di Sektor Ekonomi

Agama Islam memang memiliki potensial untuk menciptakan sebuah masyarakat yang egaliter. Di dalam bukunya *Hierarchy and egalitarianism in Islamic thought*, Prof. Louise Marlow (2002) menunjukkan bahwa pada awalnya agama Islam di daerah Arab dan Persia memang cenderung egaliter, namun sifat kesederajatan relatif cepat terkikis setelah pemerintahan Islam menjadi mapan.

Lagi pula Islam yang dibawa ke Indonesia terpengaruh aliran Sufi yang percaya bahwa raja adalah naungan Allah di muka bumi. Konsep kerajaan tersebut mudah diterima oleh raja Nusantara karena mirip dengan konsep Hindu-Buddha dewa raja yang memuja dan menganggap raja memiliki sifat kedewaan. Bentuk pemujaan yang menganggap raja memiliki sifat kedewaan ini sudah berkembang di Asia Tenggara sebelum kedatangan Islam sehingga mempermudah transisi dari budaya Hindu-Buddha ke Islam.

Susunan masyarakat di Kerinci yang ternyata tidak terlalu terpengaruh oleh kedatangan Islam tampak bila kita membandingkan TK 214 dengan TK 215. Di dalam kedua naskah tersebut terdapat daftar denda bagi seorang pencuri ayam. Menarik bahwa tingginya denda disesuaikan dengan lapisan sosial si pemilik ayam itu.



Gambar 2. TK 214, halaman 11

TK 214 menetapkan apabila seorang mencuri ayam milik budak (*sahaya urang*), maka pencuri tidak hanya harus menggantikan ayam yang dicuri tetapi harus mengembalikan ayam satu lagi sebagai denda (*pulang dua*). Kalau ayam dimiliki rakyat biasa (*benua*) dendanya tiga kali dari jumlah ayam yang dicuri (*pulang tiga*). Kalau ayam bangsawan (*gutera*) pulang lima sedangkan ayam Dipati pulang tujuh, dan ayam raja pulang dua kali tujuh. Jadi stratifikasi masyarakat Kerinci pra-Islam terdiri atas lima lapisan masyarakat dari budak hingga ke raja:

TK 214 (hlm. 10–11)

Maling hayam sahaya urang, [11] bagi es[a] pulang dua.

Hayam bennua s[a]ikur pulang tiga.

Hayam kutera bagi s[a]ikur pulang lima.

Hayam dipati, ayam anak cucu dipati bagi s[a]iku[r] pulang tujuh.

Hayam raja bagi [e]sa pulang dua kali tujuh.

Di TK 214 disebut juga denda berupa uang. Apakah denda ini ditambah dengan denda sebelumnya tidak jelas. Juga tidak jelas mengapa untuk ayam milik seorang budak (*sahaya urang*) tidak disebut dendanya:

Hayam be[n]nua lim[a] kupang, hayam pulang manikal. (1,25 mas)

Hayam gutera tengngah tiga mas. (2½ mas)

Hayam hanak cucu dipati hayam dipati lima mas. (5 mas)

Hayam raja sapuluh mas. (10 mas)

Uang yang digunakan adalah mas dan kupang (seperempat mas). Satu mas setara 2,4 gram emas.

Di dalam naskah TK 215 jumlah dendanya berbeda sedikit.

TK 215

*Jika memaling ayam **sahaya orang** tengah tiga emas akan dendanya ayam pulang menikal. (2½ mas)*

*Jika memaling ayam **orang banyak** lima emas akan dendanya ayam pulang menikal. (5 mas)*

*Jika memaling ayam **raja** setahil akan dendanya ayam pulang menikal. (16 mas)*

*Jika ayam **depati** anak cucu depati denda sepuluh emas ayam pulang menikal. (10 mas)*

Susunan masyarakat Kerinci di zaman Islam pada hakikatnya sama dengan di zaman Buddha, hanya lapisan *gutura*² tidak ada lagi. Juga dari segi jumlah denda yang ditetapkan tidak ada perbedaan yang mencolok. Selain perubahan di bidang stratifikasi sosial masyarakat Kerinci terjadi juga perubahan di bidang ekonomi. Baik TK 214 dan TK 215 menyebut pencurian hewan seperti ayam, itik, dan anjing, sementara hewan babi hanya disebut di TK214.

Perubahan yang lain di bidang ekonomi tidak disebabkan oleh kedatangan agama Islam, tetapi oleh kedatangan bangsa Eropa (Portugis, Inggris, dan Belanda). Perubahan terbesar ada di sektor pertanian karena Portugis membawa tanaman yang berasal dari benua Amerika ke Indonesia. Tanaman baru yang belum ada di Indonesia sebelum abad ke-16 termasuk cabai, jagung, tembakau, tomat, bayam, nanas, kacang tanah, kentang, dan banyak tanaman lainnya. Lada sudah dikenal sejak dahulu kala oleh orang Melayu, tetapi lada yang menjadi laku sebagai komoditas perdagangan bukan lada asli Indonesia, melainkan lada piper nigrum yang didatangkan oleh orang Eropa dari India.

Walaupun berasal dari daerah Arab, kopi tidak dibawa oleh bangsa Arab, tetapi oleh orang Belanda. Sebelum abad ke-17, orang Belanda belum mengenal kopi yang baru sampai di Belanda pada tahun 1640. Masih pada abad yang sama Belanda membawa biji kopi ke Indonesia untuk dibudidayakan. Tanaman pangan yang disebut di TK 214 dan TK 215 adalah *beras*, *jawa*, *jagung* (Betari, Sorghum), dan *anjalai* (Coix lacrimo-jobi L.). Di antara keempat tumbuhan biji-bijian (serealia), kini hanya padi yang masih dikonsumsi secara umum di Indonesia sementara yang lain kurang dikenal lagi. Hilangnya tanaman pangan dari bumi Indonesia, termasuk Jambi dan Kerinci, berkaitan dengan kedatangan Portugis yang membawa tanaman pangan baru yang menggeser tanaman pangan asli Indonesia. Salah satu contoh ialah jagung.

Jagung yang kita kenal sekarang mempunyai nama Latin *Zea mays* L. Sebelum Portugis membawa biji jagung dari benua Amerika, di Indonesia sudah ada tanaman yang bernama jagung. Tanaman itu kelihatan memang mirip dengan *Zea mays*, tetapi berbeda jenis dengan nama Latin *Sorghum*. Ternyata setelah *Zea mays* diperkenalkan Portugis maka lama-kelamaan *Sorghum* tergeser sehingga tidak lagi atau jarang ditanam. Kini

2 Kata *gutura* (yang sekali salah dieja menjadi *kutera*) kemungkinan besar berasal dari bahasa Sanskerta *gotra* yang berarti 'marga'. Namun dalam konteks masyarakat Kerinci maka *gutura* mestinya ada lapisan masyarakat yang berdiri di antara rakyat biasa dan Dipati, artinya orang terpendang.

jagung asli Indonesia (*Sorghum*) masih dikenal dengan nama Sorgum atau Betari, tetapi tidak lagi menjadi tanaman pangan yang penting.

Dari TK 215 kita mengetahui bahwa hingga abad ke-17 sorgum (*jagung*), dan hanjeli (*anjalai*) masih ditanam dan dimakan, sementara jawawut (*jawa*) masih disebut di TK 214 tetapi tidak lagi di TK 215. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa pada saat TK 215 ditulis, jawawut tidak lagi dikonsumsi secara umum. Kini, ketiga jenis tanaman biji-bijian tersebut jarang dikonsumsi. Anjalai (juga disebut hanjeli, jali-jali atau jelai), sorgum, dan jawawut masih kadang-kadang digunakan untuk bubur, tetapi tidak lagi memainkan peranan penting sebagai bahan pangan. Di dahulu kala, *anjalai*, *jawa*, dan *jagung* (sorgum) menjadi bahan pangan yang sangat umum di Sumatera, tetapi kini sudah digeser oleh padi dan jagung (*Zea mays*).

Selain daripada bahan pangan di atas, tanaman lain yang disebut di TK 215 adalah sirih dan pinang, yang hingga kini masih digemari oleh masyarakat Melayu. Tuak juga disebut, di TK 214 dan di TK 215 sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa tuak masih dikonsumsi di zaman Islam.

Kampung-kampung Melayu pada umumnya terletak di tepi sungai yang dimanfaatkan sebagai sumber ikan. Untuk menangkap ikan masyarakat Kerinci mengenal berbagai jenis alat penangkap ikan yang disebut di dalam TK 215, termasuk bubu hampangan, pukat, jala, tangkul, pesap, telai, dan tengkalak. Perahu dan perlengkapannya disebut biduk dengan pengayuh dan galah. Sebagian alat itu juga disebut di dalam TK 214 sehingga di sektor ekonomi perikanan tampaknya tidak ada perubahan.

Baik TK 214 dan 215 menyebutkan tentang pencurian berbagai jenis logam seperti besi bebajan, besi Kersani, besi meléla dan baja tumpang, serta timah, emas, perak, kuningan, riti-rancung (sejenis kuningan), dan tembaga. Besi Kersani adalah besi bermutu tinggi yang berasal dari daerah Khorasan di Persia.

Ternyata kedua naskah undang-undang TK 214 dan TK 215, menunjukkan banyak persamaan, baik di segi stratifikasi sosial (ketatanegaraan) maupun ekonomi yang mengisyaratkan bahwa peralihan dari zaman pra-Islam ke zaman Islam terjadi secara berkesinambungan tanpa ada perubahan yang mendasar di bidang ekonomi kecuali di bidang ekonomi pertanian yang mengalami perubahan signifikan yang disebabkan oleh impor tanaman pangan baru dari benua Amerika.

Satu lagi perubahan penting yang terjadi di bidang ekonomi berkaitan dengan perdagangan rempah-rempah. Alasan utama kedatangan Portugis di Nusantara untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah seperti kayu manis, kapulaga, jahe, lada, pala, bunga lawang, cengkih, dan kunyit. Oleh sebab itu, Portugis menaklukkan Melaka pada tahun 1511, dan tidak lama kemudian Portugis sudah mulai terlibat dalam perdagangan lada dengan Jambi yang antara abad ke-16 hingga abad ke-18 menjadi komoditas penting, terutama di Jambi Hulu dan juga di Kerinci.

Hubungan Kerinci dengan Jambi

TK 215 bermula dengan perkataan berikut:

Bismillāhi r-rahmāni r-rahīm. Ini surat titah Pangeran di dalam undang-undang kepada segala depati di dalam tanah Kerinci tatkala Raden Temenggung dititahkan duli Pangeran naik Kerinci menetapkan hamba rakyat duli Pangeran hina dahina. Maka datang ke Kerinci maka Raden Temenggung duduk di dalam Sanggaran Agung. Tatkala itulah Raden Temenggung menyuratkan undang-

undang ini. Barang siapa tiada mengikut seperti kata surat yang di dalam undang-undang akan pakaian segala depati yang di tanah Kerinci ini.

Baik TK 214 maupun TK 215 merupakan kitab undang-undang, tetapi TK 214 disebut sebagai *Nītisārasamuccaya* atau Ikhtisar Hakikat Kebijaksanaan yang maknanya tidak jauh berbeda dengan ‘Surat Titah’— istilah yang dipakai di TK 215. Kita tidak tahu dengan pasti apakah sang Pangeran adalah Sultan Jambi, salah satu anaknya, atau seorang penguasa lokal yang bertindak atas kuasa sang Sultan. Namun untuk sementara, kita beranggapan bahwa yang dimaksud dengan Duli Pangeran adalah Sultan Jambi sendiri.

Raden Temenggung dititahkan oleh Duli Pangeran untuk naik ke Kerinci dan menetap di Sanggaran Agung. Kampung yang juga dikenal dengan nama Sandaran Agung dan yang terletak di tepi Danau Kerinci pernah menjadi salah satu tempat yang paling utama di Kerinci. Dari sinilah Batang Merangin mengalir arah ke hilir untuk bermuara di Batang Tembesi yang sendirinya merupakan anak sungai Batang Hari — sungai terbesar di Sumatera yang bermuara dekat kota Jambi. Sanggaran Agung juga dipilih Belanda sebagai pusat pemerintahan sebelum dipindahkan ke Sungai Penuh. Tidak diketahui apakah Raden Temenggung memiliki tempat tinggal sementara atau menetap di Sanggaran Agung, tetapi dari naskah TK 42 kita ketahui bahwa di samping Muara Mesumai (yang kini dikenal sebagai kota Bangko, Kabupaten Merangin), Sanggaran Agung memainkan peranan penting di dalam hubungan antara Jambi dengan Kerinci: “*Adapun tanah Jambi dua anaknya: Suatu Muara Mesumai, kedua tanah Sanggaran Agung.*”

Kita juga tidak mengetahui dengan pasti apakah Duli Pangeran yang mengeluarkan piagam tersebut adalah Sultan Jambi, dan kita juga tidak tahu pada masa Sultan yang mana piagam itu dikeluarkan, namun penjelasan berikut kiranya dapat mencerahkan kita untuk lebih mengetahui sejarah Jambi dan hubungannya dengan Kerinci.

Letak Muara Mesumai di tengah-tengah daerah Merangin (yang kini menjadi kota Bangko, Kab. Merangin) sangat strategis karena merupakan titik temu dua sungai penting, yaitu Batang Merangin dan Batang Mesumai. Melalui Batang Hari, Batang Tembesi, dan Batang Merangin, kapal dapat berlayar dari Selat Melaka hingga ke Muara Mesumai. Dari sini perjalanan harus diteruskan dengan berjalan kaki mengikuti Batang Merangin sepanjang 140 km sampai ke Sanggaran Agung. Perjalanan tersebut memakan waktu beberapa hari, bukan hanya karena jaraknya, tetapi juga karena Muara Mesumai hanya 90 m di atas permukaan laut sementara Sanggaran Agung 780 m dpl. Lembah Kerinci merupakan daerah aliran sungai yang satu-satunya titik keluarnya adalah Batang Merangin.

Menurut cerita yang sangat populer di Kerinci, Sultan Jambi menugaskan seorang pembesar keturunan Majapahit dengan gelar Pangeran Temenggung untuk memerintah pedalaman Jambi dari Muara Mesumai. Nama beliau disebut sebagai Kebul, Keбал, Kabul, Kebaru, atau Kebaruh, dengan kepanjangan (Kebul) di Bukit. Para Dipati di Kerinci diangkat oleh Pangeran Temenggung dan mereka diberi surat cap. Sebagai imbalan para Dipati diwajibkan untuk membayar upeti (*jajah*) kepada Sultan Jambi. Sistem tersebut menguntungkan kedua belah pihak karena Jambi menjadi makmur dengan memperdagangkan hasil bumi dan hasil hutan yang mereka dapatkan dari daerah pedalaman, sementara Kerinci memperoleh barang kebutuhan pokok seperti garam dan besi dan juga barang mewah seperti kain buatan luar negeri atau keramik Tiongkok dari Jambi.

Kedatangan orang Eropa membawa perubahan mendasar karena mereka datang ke Indonesia untuk mencari lada dan rempah lainnya yang dapat mereka jual dengan harga setinggi langit di Eropa. Pada tahun 1511 Melaka ditaklukkan oleh Portugis, dan tidak lama kemudian mereka mulai berdagang dengan Jambi. Tahun 1615 Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) membuka pos perdagangan di Jambi, sehingga selama abad ke-17 Jambi menjadi salah satu pusat perdagangan lada yang terkemuka di Indonesia. VOC adalah kongsi dagang terbesar asal Belanda yang pada abad ke-17 membangun monopoli di jalur perdagangan rempah-rempah.

Lada hanya dapat ditanam di daerah dengan curah hujan yang tinggi dan daerah yang paling cocok adalah pedalaman Jambi di kawasan hulu Batang Hari, Batang Tembesi dan Batang Merangin yang mencakup Kabupaten Tebo, Batang Hari, Sarolangun, Bungo, Merangin, dan juga Kabupaten Dharmasraya di Sumatera Barat. Menurut Colombijn (2003, hlm. 519) lada malah ditanam di lembah Kerinci mulai dari paruh kedua abad ke-17. Pada awal abad ke-17, Jambi dianggap kawasan termakmur kedua di Sumatera setelah Aceh, dan menikmati suasana yang damai dan sejahtera baik di bidang ekonomi maupun politik terutama di bawah pemerintahan Sultan Agung (1639-79).

Jambi Hilir memiliki letak yang strategis di tepi Batang Hari tidak jauh dari Selat Melaka. Tanahnya memang kurang subur sehingga sebagian kebutuhan pokok harus diimpor, tetapi Jambi Hilir menjadi kaya karena memperdagangkan hasil bumi dari pedalaman-dari Jambi Hulu dan juga dari Kerinci dan Minangkabau.

Karena dataran tinggi di Bukit Barisan termasuk daerah yang paling subur di Sumatera, maka kebanyakan penduduk tinggal di pegunungan seperti di Kerinci dan Minangkabau yang sangat padat akan penduduk. Mereka, bersama dengan daerah di Jambi Hilir seperti Sarolangun, Merangin, Bungo, Bangko, atau Tebo mengeksport emas, hasil tanah seperti beras dan lada, dan hasil hutan seperti kemenyan, rotan, serta berbagai jenis getah. Sementara barang yang tidak tersedia seperti logam, garam, serta barang mewah dari luar negeri diperolehnya dari pesisir termasuk Jambi Ilir. Secara tradisional, daerah pedalaman dan pesisir saling membutuhkan dan saling tergantung.

Jambi Ilir berbeda dengan Jambi Ulu atau Kerinci karena di sini terdapat kota yang relatif besar seperti misalnya kota Jambi (namun ada pula kalanya penduduk kota Jambi hanya 600 orang), tetapi di luar lingkungan kota penduduknya jarang, dan pemukiman hanya terdapat di tepi sungai yang mengalir ke Selat Melaka, terutama Batang Hari dan anak sungainya. Veth (1882) memperkirakan penduduk Jambi tanpa Kerinci sekitar 75.000 sementara penduduk Kerinci 51.800. Ketika sensus 1930 diselenggarakan, Residentie Jambi (yang tidak termasuk Kerinci) memiliki 78.000 penduduk. Saat itu Kerinci menjadi bagian dari Sumatera Barat – tepatnya Onderafdeeling Koerintji di dalam Afdeeling Koerintji-Indrapoera, Residentie Sumatra's Westkust. Onderafdeeling Kerintji yang relatif kecil ini pada tahun 1930 memiliki 92.000 penduduk. Oleh sebab itu maka Jambi Ilir, kalau hendak berperang, tergantung pada pasukan yang didatangkan dari Jambi Ulu dan Kerinci.

Pada paruh kedua abad ke-17 harga lada mulai merosot karena produksi yang berlebihan mengakibatkan harga pasaran di Eropa anjlok. Masa kejayaan Jambi berakhir dengan pemerintahan Sultan Agung dan hubungan Jambi Ilir dengan Jambi Ulu termasuk Kerinci menjadi lebih tegang.

Menurut Colombijn (2003), perjanjian antara Sultan Jambi dengan *East India Company* (Inggris) dan *Vereenigte Oost Indische Compagnie* (Belanda) membuat Sultan Jambi percaya bahwa dengan dukungan penguasa luar negeri mereka bisa menguntungkan dirinya dengan menekan mitranya di daerah ulu (Jambi Ulu dan Kerinci) dalam hal penanaman lada. Namun kebijakan baru ini ternyata tidak berhasil karena para petani dengan mudah dapat mengalihkan ekspor komoditasnya ke daerah yang lain. Hal itu membuat pihak perusahaan Eropa geram karena Jambi (Ilir) tidak bisa memenuhi kewajiban kontraktualnya. Akhirnya pada tahun 1677 M *East India Company* malah memutuskan hubungan dengan Jambi sehingga tinggal VOC sebagai mitra dagang tunggal untuk lada. VOC memanfaatkan kesempatan ini dengan membayar harga lada yang sangat rendah dan sekaligus memaksakan Jambi untuk hanya boleh mengimpor kain asal India lewat VOC. Lada sudah ditanam di Kerinci pada paruh kedua abad ke-17, dan pada saat itu juga Pangeran Dipanegara, anak Temenggung Merangin, memperluas kekuasaannya sampai di Kerinci.

Tambo Kerinci

Pada tahun 1941 pegawai bahasa pemerintah kolonial Dr. Petrus Voorhoeve mendaftarkan 261 naskah yang ditemukannya di Kerinci. Transliterasi (alih aksara) dilakukan oleh Voorhoeve, istrinya, dan Guru Hamid dari Kerinci dan dimasukkan di dalam sebuah buku stensilan yang diberi nama Tambo Kerinci (TK).

Sayang, tidak semua naskah mencantumkan tanggal serta tempat penulisannya hanya pada TK 212 dan TK 43 tempatnya disebut. Namun demikian, dari nama penulis serta cap umumnya kita dapat mengetahui tempat asalnya, tetapi apakah sebuah naskah berasal dari Jambi Ilir atau Jambi Ulu, tidak selalu jelas. Dari totalnya 91 naskah Jawi yang tercatat di dalam Tambo Kerinci, hanya 20 tertanggal, sementara tiga di antaranya (TK 59, 67, 231) hanya memiliki tanggal tetapi tahun penulisan tidak tercantum. Di antara tujuh belas naskah Kerinci yang tertanggal yang dimuat di dalam Tambo Kerinci, hanya dua berasal dari abad ke-17, sembilan dari abad ke-18, dan lima dari abad ke-19.

Hal itu tidak berarti bahwa naskah yang lain tidak bisa diperkirakan tahun penulisannya. Kadang-kadang bisa dilakukan berdasarkan nama yang disebut, atau jika isinya mirip dengan isi naskah lain yang bertanggal. Walaupun tak bertarikh, dari nama orang yang disebut kita tahu bahwa naskah TK 231 ditulis pada tahun 1192 H/1778 M.

Jambi semasa Sultan Anum Ingalaga (1679–1687)

Abad ke-17 adalah zaman keemasan Jambi yang menjadi bandar terkaya kedua di Sumatera setelah Aceh, dan pada tahun 1670-an kerajaan ini sederajat dengan tetangga-tetangganya seperti Johor dan Palembang. Namun hanya sepuluh tahun kemudian Jambi memulai mengalami kesulitan ekonomi yang antara lain disebabkan oleh perang dengan Johor. Karena dianggap kurang menguntungkan maka pada tahun 1679 Inggris menutup pos perdagangan di Jambi. Sayang sekali, justru dari zaman keemasan tidak ada naskah di Kerinci yang berasal dari Jambi (atau dari tempat yang lain) dan yang bertarikh sebelum 1679.

Sultan Jambi yang bernama Sultan Anum Ingalaga atau Sultan Abdul Muhyi (1679–1687) menandatangani berbagai perjanjian dengan VOC. Pada 11 Agustus 1683 Sultan Ingalaga memberi hak eksklusif (monopoli) kepada VOC sebagai pembeli lada yang menetapkan harga yang sangat murah, dan juga sebagai pengimpor tunggal kain dan

candu (opium) ke Jambi. Namun, kain impor tersebut tidak laku karena tidak ada pembeli. Rakyat menjadi terlalu miskin karena Jambi terlibat dalam sengketa dengan Johor dan Palembang yang mengusir tiap kapal yang hendak berlabuh di Jambi. Hubungan dengan wilayah pedalaman (Jambi Ulu) juga terganggu karena Sultan Ingalaga secara paksa mengerahkan orang untuk menjadi tentara sehingga sebagian penduduk memutuskan untuk mengungsi (Andaya 2014, hlm. 110).

Belanda merasa dirugikan oleh Sultan Anum. Tahun 1685 VOC mencatat laba sekadar 2.868 Gulden sementara di Palembang VOC mencatat untung sebesar 37.570 Gulden. Pada tahun 1688 VOC memutuskan untuk mengasingkan Sultan Anum Ingalaga ke Batavia.

Di Kerinci tidak terdapat satu pun naskah semasa kekuasaan Sultan Anum Ingalaga, tetapi ada satu piagam (Renah Kemumu MS C) yang dikirimnya ke Dipati Paling Jiwa di Serampas yang mengangkatnya menjadi penguasa di atas kepala lain beserta pengikutnya (marah menteri peranakannya) (Gallop 2009, hlm. 292).

Jambi semasa Sultan Kiai Gede & Pangeran Pringgabaya (1687–1719)

Naskah tertua di Tambo Kerinci adalah TK 23 yang berasal dari tahun 1110 H (1688/89 M).³ Naskah ini berbunyi:

Anya ini surat hijrat nabi shallāllāhu ‘alaihi wa sallam. Ini Piagam Pangeran Suria Karta Negara tasarah pada Dipati Payung Negari seluruh Bukal Pandan dalam Sungai Penuh, sulu silirnya, sereguk airnya, sekepal tanahnya, seekor ikannya, silupak anunya, sepaya sebangkuangnya, kayu pingkuk kayu secupak segantangya, anak jantan anak batinanya, seputih sehitamnya, sendenda setianya, panjang kalamnya. Ada maka dalamnya depati yang berempat empunya. Hubaya² jangan dilalu. Sanah 1100 tammat.

Namun, tanggal penulisannya dapat diragukan karena perkataan “sanah 1100 tamat” lain tulisannya daripada tulisan piagam itu. Selain itu, tidak jelas siapa Pangeran Suria Karta Negara. Kalau tanggalnya benar maka naskah itu jatuh di dalam masa kekuasaan Sultan Kiai Gede (1687–1719).

Selain TK 23 masih ada satu naskah Kerinci lainnya dari abad ke-17, yang tidak termuat di Tambo Kerinci, tetapi salinannya terdapat di Perpustakaan Universitas Leiden dengan nomor Cod. Or. 12326-1 yang ditulis pada tahun 1106 H (1694 M). Naskah ini dibahas oleh Hafiful Hadi Sunliensyar (2019) dan Annabel Gallop (2009).⁴

Lalu ada pula Piagam Kumun yang berasal dari Kumun, sebuah kampung di Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh (Yosef Ibrahim 2014). Piagam tersebut bertarikh 21 Syahban 1106 atau 5 April 1695 M. Alih aksara piagam sebagai berikut:

3 Menurut Sdr. Bopi Cassia Putra terdapat satu naskah yang lebih tua yang tidak tercantum di dalam Tambo Kerinci. Naskah itu yang Disimpan oleh Luhah Rio Jayo di dusun Sungai Penuh, berupa piagam yang dikirim kepada Depati Santiudo bersama Depati Payung dan Ngabi Teah Santiyo Bawo. Walaupun tidak tertanggal ada indikasi berdasarkan cap dan naskah bandingan bahwa naskah tersebut ditulis antara 1639–1670 M.

4 Cod. Or. 12326 merupakan fotokopi dari Ms. 396, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini bukan koleksi piagam asli melainkan salinan dari naskah asli.

Wabakdhu kemudian maka diterangkan kepada kembar rekan serapat Depati dalam dusun Kumun serto dipakai orang sri Pangeran Sri Rajo yang duduk di tanah lebar.

Kepada kembar rekan serapat Depati dalam dusun Kumun serto dipakai orang empat koto mentinyo.

Tatkala bagindo mengaruniakan Piagam ini maka Sri baginda kurniakan hutan tanah baginda, kayu pendek kayu panjang serta anak buah kemenakan sertra marah mentinyo Kemuan Sungai Panjang, seberang hujung tanah lalu ke pauh Aro Nago, terus ke sangkir mati lalu ke Bane tumbuk tigo lepas ke lubuk Jeluang sampai teluk Bungsu, lalu ke lubuk Langkakak menuju betung balarik, bukit rupung aur badiwo. Sehelai daun kayunyo, seekor ikannyo, sekepal tanahnyo, seikat benang dipakai tenaga anak buah kemenakannyo. Mara mentri serta cupak gantang, tandan dan seisinyo, sepanjang sepangkal lamonyo, sepacung setapal dipilih dalam tanah Kemuan.

Wabakdhu, tiado boleh dilawan digagah oleh marah mentrinyo serto cupak gantangnyo dan anak jantan anak batinonyo, kalau dilawan luka tidak berpampas, mati tidak babangun dan lagi dimakan sumpah sati, tak boleh kamu berajo hitam berajo putih, kalu kamu berajo hitam berajo putih menghadap mudik dimakan biso kawi, tidak perempuan mengandung. Hilir dimakan kutuknyo Pangeran Temanggung Kebal di Bukit dan bertempat di talang kayu jauh adonyo.

Kepado bulan ruwah maka Pangeran bagindo mengurniakan Piagam ini kepada Depati bentukkan Dusun.

Tamat Kalam surat Kemuan adonyo. Cap Pangeran Temanggung Kebal di bukit.

Terlampir pada naskah di atas ada sehelai surat lain yang disebut sebagai *slak*, yaitu *celak* yang artinya sama dengan piagam.

SLAK [cap]

Hijrah Nabi Sollalla Alihi Wasallam pada tahun seribu seratus enam tahun alih, pada selikur hari bulan Syakban pada hari Ahad... Pangeran Tamanggung Kebal di Bukit memberi juo surat Piagam kepada Depati Galang Negeri serta Depati Nyato Nagaro, serta dengan Depati Puro Nagaro serta dengan Depati Sampurno Bumi Putih.

Semarah semantinyo, senadah satinyo, sepunjung sesuluhnyo, sehutan setanahnyo, pertama tanah perbatasannyo, sehulam sekampuk, anak menuju lubuk tumbuk duo dari lubuk tumbuk duo menuju Palimo Serupuk dari Palimo Serupuk menuju Pematang Kesik dari situ menuju bukit melintang dan lari ke Hilir saken datuk cahaya dupati hilang di pauh menuju lubuk Jaluang dari situ menuju Sialang belantak besi dari sialang belantak besi menuju bukit rupung dan lagi yang dijejak rajo, oleh marah manti, anak jantan anak batino batang airnyo Kemuan Sungai Panjang.

Sehelai daun kayu melainkan depati yang berempat yang mengajun mengarah, merahmenti anak jantan anak batino, barang siapa marah mentinyo atau anak jantan anak betino, atau meniadakan atau memberatkan atau meringankan melainkan kena kutuk Pangeran Temanggung Kebal di Bukit, barang siapa meniadakan juo itu melainkan duduk depati yang berempat yang semenjak

*diduduk, semenjak yang besar diduduk besar oleh Depati yang berempat dengan surat Piagam ini di Dusun Muara Masumai dan yang menyuratnyo.
Jenang serta serah dihadapan Depati Setio Rajo Serto.
Cap oleh Pangeran Temanggung Kebal di Bukit.*

TK 22, 174, dan 205 bertarikh 1116 H/1704 M. Tiga piagam ini dikeluarkan oleh Pangeran Suta Wijaya ketika Jambi dipisah menjadi kerajaan Ulu yang dikepalai Pringgabaya (1691–1710) dan kerajaan Ilir di bawah abangnya Sultan Kiai Gede yang juga dipanggil Pangeran Depati (1687–1719).

Sebagaimana halnya dengan TK 23, TK 22 juga merupakan piagam yang dikeluarkan oleh Pangeran Suria Karta Negara kepada Depati Payung Negari di Sungai Penuh, sementara Cod. Or. 12.326-1 adalah surat piagam yang dikirim oleh Pangeran Suta Wijaya (Sutawijaya) untuk Depati Suta Menggala di Tanah Seleman, Kerinci. Piagam Cod. Or. 12.326-2 hingga 12.326-5 tidak bertanggal namun dapat dipastikan berasal dari kurun waktu yang sama. Di dalam cap naskah ini tertulis teks “As-Sultan Abdul Muhyi Ibn Abdul Jalal”, dan gambar cap “memiliki kesamaan dengan bubuhan cap dalam naskah piagam Renah Kemumu MS C dan dokumen kontrak Jambi-VOC pada tahun 1681 (lihat pula Gallop, 2009: 292, 319)” (Hafiful 2019, hlm.168). Naskah 12.326-5 merupakan surat titah yang dikeluarkan oleh Pangeran Suta Wijaya bersama dengan Sultan Minangkabau Ahmad Syah kepada Depati Empat dan Depati Uda Menggala untuk tetap “beraja” dan bekerja sama dengan pihak Pagaruyung (Hafiful 2019).

Jambi Terbelah Dua

Setelah Sultan Ingalaga diasingkan maka kedua anaknya, Pangeran Depati dan adiknya Pangeran Pringgabaya⁵, terlibat konflik perebutan kekuasaan. Masing-masing mereka mengklaim dirinya berhak menjadi raja dan mencari sokongan dari masyarakat. Dengan bantuan VOC Pangeran Depati, dinobatkan sebagai raja dengan gelar Sultan Kiai Gede dan menempati keraton Tanah Pilih di Kota Jambi. Karena adiknya Pringgabaya tidak mengakui abangnya sebagai pengganti sah ayahnya maka Pringgabaya pindah ke daerah hulu dan menetap di Mangunjaya (Muara Tebo) yang penduduknya masih setia pada ayahnya.

Untuk mengesahkan kekuasaannya masing-masing, Kiai Gede dan adiknya, Pringgabaya memerlukan sokongan politik baik dari kerajaan lain maupun dari rakyat yang ada di Jambi. Kiai Gede didukung oleh VOC, sebagian besar rakyat di Jambi Ilir, dan juga penguasa kampung yang berbatasan dengan wilayah Kesultanan Palembang.

Sementara Pangeran Pringgabaya mendapat dukungan politik dari Sultan Minangkabau Yang Dipertuan Ahmad Syah (bertahta kira-kira 1676–1695), serta sebagian besar masyarakat di Jambi Ulu. Pringgabaya dinobatkan oleh Sultan Minangkabau sebagai Sultan Jambi dengan gelar Sri Maharaja Batu Johan Pahlawan Syah (Hafiful 2019, hlm. 174).

Dengan adanya Mangunjaya maka Jambi terpisah menjadi kerajaan ulu berkedudukan di Mangunjaya dan kerajaan ilir dengan pusatnya di Tanah Pilih selama kurun waktu tiga puluh tahun. Karena Mangunjaya terletak secara strategis antara Minangkabau, Indragiri, dan Tungkal, maka Mangunjaya bisa memperdagangkan lada dan emas dari pertambangan di Minangkabau dengan saudagar asal Bugis yang

5 Juga dikenal sebagai Sri Maharaja Batu Johan Pahlawan Syah, atau Raden Julat.

membawa kain, madat dan kebutuhan lainnya. Dibandingkan dengan Jambi Ilir yang terputus dari perdagangan lada, maka Jambi Ulu malah menjadi lebih makmur, dan Kiai Gede tidak berdaya mengusir Pringgabaya bahkan dengan bantuan VOC dan senjata unggulnya mengingat jaraknya yang lumayan jauh dan keadaan alam yang menghambat transportasi pasukan ke arah hulu. Lagi pula Kiai Gede menghadapi masalah bahwa penduduknya dan terutama juga pasukannya berangsur-angsur meninggalkan Tanah Pilih.

Karena Minangkabau merasa dirugikan dengan adanya konflik berkelanjutan di Jambi maka tahun 1696 Sultan Minangkabau berusaha untuk mendamaikan kedua saudara, tetapi perdamaian itu tidak berlangsung lama dan Jambi tetap terbelah dua.

Menjelang tahun-tahun terakhir abad ke-17, keadaan di Tanah Pilih dari tahun ke tahun menjadi semakin buruk, tetapi situasi di Mangunjaya juga memprihatinkan, terutama sejak Pringgabaya tidak lagi didukung oleh Sultan Minangkabau sehingga penduduk Tujuh Kota dan Sembilan Kota yang dihuni oleh para pendatang dari Minangkabau menolak mengakui Pringgabaya.

Setelah itu Pringgabaya kehilangan Merangin pula. Pringgabaya menikah dengan kakaknya Suta Wijaya yang memerintahkan kawasan Merangin sebagai Mangkubuminya (perdana menteri) (Andaya 1993, hlm. 148).

Pringgabaya tidak lagi diakui di Merangin yang kaya akan lada dan yang sudah dikendalikan oleh putranya Pangeran Dipanegara berkat hubungan ekonomi dan politik yang kuat dengan Bengkulu dan Kerinci.

Untuk menegaskan kedudukannya maka Pringgabaya mulai menggunakan kekerasan. Kampung dibakar sehingga penduduknya terpaksa mengungsi, dan keadaan malah menjadi lebih parah ketika Pringgabaya mengangkat pengikutnya sebagai pejabat walau mereka tidak memiliki pengalaman (Andaya 1993, hlm. 140).

Adanya konflik antara Mangunjaya, Merangin, dan Tanah Pilih menyebabkan kerenggangan hubungan Jambi dengan Kerinci. Karena konflik tersebut maka orang Kerinci enggan turun ke Jambi. Hal ini juga disebut oleh Pangeran Suta Wijaya dalam surat Cod. Or. 12326-5 (Perpustakaan Universitas Leiden):

Selama ini kami berkelahi dua bersaudara patutlah Depati Empat tiada mau la(gi) turun” (Hafiful 2019, hlm. 172).

Di dalam surat titah TK 243 kepada para Depati di Kerinci, Suta Wijaya menyinggung bahwa ia sedang menghadapi masalah yang rumit dengan iparnya di Mangunjaya:

Ini titah duli Pangeran Suta Wijaya datang kepado segala dipati empat d..... Menggala dan segala dipati Kurinci. Jikalau lagi kamu ingat kepada su(m)pah setia ka..... kepada duli Pangeran Suta dan orang tuha² duli Pangeran istimewa kepada orang.....kamu ‘alam Kurinci dengan bersumpah orang tuha duli Pangeran Sutan duli Pangeran Suta..... banyak ia tanah Merangin itu jikalau lagi ingat kepada su(m)pah kamu yang dahulu² sakali jangan kamu beri orang Mangunjaya atau anak ulu masuk ke dalam Merangin itu karena duli Pangeran Suta mintak dibebat(?) baik² tanah Merangin itu kepada kamu. Jikalau bekeras juga orang Mangunjaya atau anak ulu hendak membinasakan Merangin itu melainkan kejarkan dengan se-boleh²nya kamu melawan dia itu. Jikalau kamu

sudah berperang, seruan hilir duli Pangeran pun datang ke Merangin itu. Itulah titah duli Pangeran serta Mangkubumi. Hubaya² jangan dila(lu) oleh kamu sekalian. Tammat.

Suta Wijaya mengingatkan bahwa rakyat Kerinci telah berjanji kepadanya akan melarang orang Mangunjaya (juga disebut Mangun Jayo, letaknya sekitar 80 km utara dari Merangin/Bangko di Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo) atau anak ulu lainnya masuk ke dalam Tanah Merangin. Suta Wijaya juga mengingatkan sekiranya orang Mangunjaya atau penduduk ulu lainnya menyerang Merangin maka orang Kerinci harus ikut membelanya.

Surat ini tidak bertanggal tetapi karena surat-surat lain dari Suta Wijaya juga bertanggal 1704 M maka dapat dipastikan bahwa surat ini pun bertanggal antara 1704 hingga 1708 M, karena pada masa itulah terjadi perselisihan antara Pangeran Pringgabaya di Mangunjaya dengan iparnya Suta Wijaya di Merangin (Pringgabaya menikah dengan kakak Suta Wijaya).

TK 174 dan TK 205, yang isinya hampir sama, adalah piagam penobatan Dipati Intan Gemala Bumi yang dikeluarkan oleh Suta Wijaya. Piagam tersebut merupakan peringatan bahwa mereka yang tidak mematuhi perintahnya akan dimakan sumpah, rumahnya akan berbalik, dan mereka akan dimakan bisa serta ketiga puluh juz Alquran.

Pangeran Suta Wijaya juga mengeluarkan sejumlah piagam yang tidak bertarikh dan yang semuanya mengandung capnya, termasuk naskah TK 210, 229, 242, dan 243, dan pada tahun 1120 H/1709 M ia menulis surat kepada Renah Kemumu, sebuah kampung terpencil di daerah Serampas (Gallop 2009, hlm. 293).

Ketika itu Suta Wijaya memainkan peranan sebagai perantara antara Sultan Jambi dan para Dipati di Kerinci. Hal itu menjadi jelas dalam surat TK 229, yang dialamatkan kepada Dipati Sanggaran Agung Suka Beraja. Dalam surat tersebut ia menyandang gelar Pangeran Temenggung.

Pada akhir abad ke-17 keadaan di Mangunjaya dan Jambi Ilir sama-sama tidak menguntungkan. Karena perdagangan lada tidak lagi menguntungkan maka Jambi Ilir telah jatuh miskin sehingga sebagian penduduk di kota Jambi dan sekitarnya tidak lagi sanggup membeli pakaian yang diimpor dari Jawa dan terpaksa mulai bertenun sendiri. Beras yang diimpor dari Ilir atau dari Jawa, juga menjadi sangat mahal (Andaya 1993, hlm. 135).

Sultan Kiai Gede (1687–1719) hanya bisa memerintah di kerajaan ilirnya dengan bantuan Belanda, sementara Pringgabaya awalnya kehilangan wilayah pedalaman yang dihuni oleh orang Minangkabau. Pada bulan September 1708 Belanda berusaha untuk mendamaikan Pringgabaya dengan Sultan Kiai Gede di Tanah Pilih (Jambi Ilir) melalui sumpah persaudaraan. Pringgabaya pindah ke Tanah Pilih untuk menjadi raja (dengan gelar sultan muda) sementara Kiai Gede diberi gelar sultan tua dengan harapan agar ia mau menyerahkan kuasanya kepada adiknya.

Namun, perjanjian tersebut diingkari Kiai Gede yang tidak bersedia menyerahkan kekuasaannya kepada adiknya. Ketika Pringgabaya menetap di Jambi Ilir, masyarakat Tujuh Kota (yang kini menjadi Kec. VII Koto, Kab. Tebo) menolak mengakuinya:

[Masyarakat VII Kota] secara terang-terangan menyatakan tidak akan mengakui kedaulatannya dan sudah bersiap-siap untuk berperang. Pringgabaya juga sudah bertentangan dengan Pangeran Sutawijaya, yang menjadi mangkubumi di

Merangin. Pringgabaya yang sudah menikah dengan saudara perempuan Sutawijaya selama dua belas tahun, tidak mau mengakhiri perkawinannya, dan berusaha untuk mengangkat anak buah kesayangannya, bekas budak dari Makassar, sebagai raja Merangin. Namun masyarakat Merangin sangat tidak setuju, sehingga Pangeran Sutawijaya berjanji kepada Kiai Gede untuk melawan Pringgabaya apabila ada pasukan yang bisa digunakannya (Andaya 1993, hlm. 148).

Tampaknya surat yang dikirim oleh Sutawijaya ke Kerinci berkaitan dengan peristiwa yang terjadi antara tahun 1708–1709, dan yang mengakibatkan kehancuran kerajaan Jambi Ulu di bawah pemerintahan Pringgabaya. Pada tahun 1710 pecah pemberontakan di Mangunjaya.

Pemberontakan tersebut dipimpin oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berniat untuk mengangkat Pangeran Sutawijaya sebagai raja. Ketika Kiai Gede muncul di Jambi Ulu maka dukungan untuk pemberontakan tersebut menguap. Senjata Pangeran Pringgabaya dibawa ke hilir beserta ibunya, para istrinya, selirnya, anaknya, serta beberapa bangsawannya yang masih menetap di Mangunjaya. Kiai Gede meneruskan perjalanannya ke Jujuhan dan Tanjung, dan pada tahun 1711 ia melaporkan kepada Gubernur-Jenderal Hindia Belanda bahwa ia telah menguasai 'segenap rakyat Sembilan Lurah' (Andaya 1993, hlm. 150).

Belanda lalu memutuskan untuk mendukung Kiai Gede dan mengirim pasukan ke Jambi untuk menangkap Pringgabaya. Lima tahun kemudian Pringgabaya meninggal di pembuangan di Banda.

Sementara keadaan ekonomi Jambi tetap suram, daerah Minangkabau semakin berkembang terutama karena pertambangan emas di Tanah Datar dan sekitarnya, tetapi juga di Jambi Ulu yang telah menjadi salah satu daerah rantau Minangkabau sejak pertengahan abad ke-17 (Andaya 1993, hlm. 140) sehingga menjelang akhir abad ke-18, Jambi berada di bawah kekuasaan Pagaruyung (Locher-Scholten 2004, hlm. 40).

Kaum perantau Minangkabau sangat menentang Kiai Gede sehingga pemberontakan terbuka pecah pada tahun 1711. Dibantu oleh VOC, Kiai Gede mengirim ekspedisi besar ke hulu untuk menumpaskan pemberontakan, dan pada tahun 1712 para pemimpin pemberontakan digantung di depan umum.

Dalam kurun waktu antara 1704 dan 1718 M hubungan antara Jambi dengan Kerinci menjadi semakin erat. Pada waktu itu Suta Wijaya memegang kekuasaan di Merangin sementara Kiai Gede, dibantu oleh Suta Wijaya, menguasai kawasan ulu dengan menyingkirkan pesaingnya Pringgabaya. Hal ini terbukti dari dua surat: TK 189, sebuah piagam yang menetapkan kedudukan Dipati Perbo Singa bertarikh 1128 H/1716 M dan TK 175, sebuah piagam yang dikeluarkan oleh Pangeran Temenggung [tidak terbaca], yang berasal dari tahun 1131 H/1718 M. Yang pertama dibubuhi cap Sultan Kiai Gede (1687–1719 M), dan yang kedua menggunakan cap Pangeran Depati Suria Negara. Sayangnya maksud piagam TK 175, yang menyebut Dipati Intan Maro Masume (Mesumai), tidak begitu jelas.

Masa Suram dan Perang Saudara (1718–1800)

Setelah tahun 1718 M ada lima puluh delapan tahun tanpa ada satu pun surat bertanggal yang tiba di Kerinci. Hal ini tidak mengherankan karena selama periode ini

keadaan di Jambi semakin memburuk dan berpuncak pada perang saudara. Pemulihan keadaan yang diharapkan setelah Jambi bersatu kembali di bawah Kiai Gede berumur pendek. Selama perekonomian ilir dalam keadaan terpuruk maka hubungan ilir dengan ulu juga tidak pulih. Di Jambi Ulu penduduk berhenti menanam lada karena harganya merosot, dan mengalihkan pekerjaannya menanam padi dan kapas karena kain impor dari India menjadi terlalu mahal (Locher-Scholten 2004, hlm. 39).

Bermula sekitar pertengahan abad ke-17 ada arus migrasi penduduk Minangkabau bukan hanya ke Jambi Ulu tetapi malahan sampai ke Semenanjung Melayu. Seratus tahun kemudian sebagian besar Jambi Ilir tidak lagi murni Melayu tetapi di banyak daerah kebanyakan penduduk adalah keturunan Minangkabau yang tetap mempraktekkan adat Minangkabau dan yang merasa lebih dekat dengan Raja Minangkabau daripada Sultan Jambi. Banyak di antara mereka datang ke Jambi Ilir untuk mendulang emas dan pada akhir abad ke-18 pendulangan emas sepenuhnya dikuasai oleh pendatang tersebut. Emas umumnya diekspor lewat Sumatera Barat dan bukan melalui Jambi, sementara hasil lada semakin merosot dan juga bermutu rendah (Locher-Scholten 2004, hlm. 40–42).

Sementara Jambi Ulu semakin menjauh dari Jambi Ilir keadaan di Ilir pun semakin tegang. Pada tahun 1718 para pembesar ilir begitu kecewa dengan kepiawaian Kiai Gede (1687–1719 M) sehingga mereka memutuskan untuk menjatuhkannya. Namun pemberontakan digagalkan oleh Belanda dan istana Kiai Gede dijaga ketat oleh VOC. Kiai Gede meninggal setahun kemudian dan diganti oleh Raden Astrawijaya, putranya Pangeran Pringgabaya.

Raden Astrawijaya yang menyandang gelar Sultan Astra Ingalaga (1719–1725 M) ternyata juga tidak lebih populer daripada Kiai Gede sehingga anak Kiai Gede, Pangeran Surianegara (1725–1726 M), berhasil menggagalkan dukungan melawan sang penguasa. Pada tahun-tahun berikutnya, Jambi dilanda perang saudara, dan malahan dua kali negerinya tidak memiliki raja.

Surianegara akhirnya menjadi Sultan pada tahun 1726, tetapi meninggal setelah beberapa bulan terkena penyakit cacar. Sultan Astra Ingalaga kemudian diangkat kembali dan memerintah lagi dari tahun 1727 hingga 1745 M, tetapi secara ekonomi maupun politik situasinya tetap genting. Minangkabau memperoleh pijakan yang meningkat di ulu, melebihi jumlah penduduk asli Melayu di banyak tempat, dan umumnya tidak setia kepada penguasa ilir. Kekuasaan Sultan Astra Ingalaga juga terancam oleh saudara-saudaranya yang semakin berpengaruh. Adik bungsunya bahkan mengambil alih Tujuh Kota pada tahun 1741 (Andaya 1993, hlm. 167).

Upaya Menegakkan Islam di Kerinci

Tidak diketahui kapan Islam pertama kali masuk Kerinci, namun proses pengislaman makan waktu cukup lama terutama di dalam sebuah masyarakat yang tergolong egaliter seperti Kerinci. Kapan persisnya Islam diterima secara umum di Kerinci juga tidak diketahui dengan pasti, namun dapat diduga bahwa proses pengislaman bermula selama abad ke-16. Menjelang akhir abad ke-18 kebanyakan penduduk Kerinci sudah memeluk agama Islam. Di samping taat beragama, masyarakat tentu juga mempraktekkan adat-istiadat yang diturunkan oleh nenek moyangnya.

Ternyata ada bagian budaya Kerinci yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang sedang dipraktekkan di Jambi. Oleh sebab itu, pihak Jambi mengimbau

masyarakat Kerinci untuk membuang sebagian kebiasaan yang masih dilakukan oleh masyarakat Kerinci dan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

Pada penghujung abad ke-18 dan awal abad ke-19 ketika Jambi berada di bawah kekuasaan Minangkabau ada tiga surat tertanggal yang semuanya dikirim dari Muara Mesumai (Bangko, Kab. Merangin) ke Kerinci. TK 212 berasal dari Pangeran Temenggung Kebal di Bukit yang mengangkat sejumlah Depati dengan memberi mereka cap serta piagam, dan menetapkan batas wilayah mereka. Piagam ini disertai peringatan: “*Barang siapa mengada-manidakkannya, yang mengadakannya boleh rahmatlahnya, yang menidakkannya kena kutuk Pangeran Temenggung Kebal di Bukit.*” Naskah yang bertarikh 1206 H/1792 M ditulis oleh Encik Lajim dari Muara Mesumai.

TK 43 bertanggal 1206 H/1794 M bermula dengan perkataan “*Inilah cap serta tapak tangan Pangeran (Suria) Kesuma dan Pangeran Ratu serta Raja Sultan Ahmad Badruddin*”. Naskah yang panjang ini penting karena menghubungkan kedaulatan Sultan dengan al-Quran. Misalnya dengan mengutip Surat Al-Baqarah 2:30 *innī jā'ilun fil-arḍi khalīfah* ‘Aku hendak menjadikan khalifah di bumi’, dan Sūrat An-Nisā’ 4:58 *wa iżā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumū bil-'adl* ‘apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil’. Ayat yang sama juga tertulis di berbagai tempat di dalam Tambo Minangkabau.

Piagam TK 44 bertanggal 1234 H/1819 M dikeluarkan oleh Pangeran Citra Puspa (Kebul?) di Bukit dan Pangeran Citra Jaya (Kebul?) di Bukit kepada Depati Sungai Laga. Naskah ini tidak menyebut tempat penulisannya, tetapi karena nama penulis diberi tambahan ‘di bukit’ maka dapat diduga bahwa naskah tersebut ditulis di Muara Mesumai.

Kedua Pangeran mengangkat sejumlah dipati dengan memberikan mereka cap dan menetapkan batas wilayahnya. Lalu dikatakan bahwa mereka yang tidak mematuhi titahnya akan kena kutuk seperti “bubung rumahnya ke bawah tiang rumahnya ke atas” sementara mereka yang mematuhinya akan “beremas banyak bepadi banyak berkat raja yang memberi piagam ini”.

Belanda, yang semakin tidak setuju dengan Sultan Astra Ingalaga (1727–1742), memaksanya untuk turun dari tahta dan menobatkan Pangeran Suta Wijaya sebagai Sultan Anum Sri Ingalaga (1743–1770 M). Sultan baru yang senantiasa berbaju putih itu juga didukung oleh para ulama.

Pada masa pemerintahan Suta Wijaya, keadaan ekonomi Jambi tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, dan VOC melaporkan bahwa pos mereka di Jambi tidak menghasilkan keuntungan selama lima puluh tahun terakhir. Sang Sultan juga kurang menaruh simpati kepada Belanda dan hubungannya semakin memburuk sehingga VOC akhirnya memutuskan untuk menutup pos perdagangan di Jambi pada tahun 1768. VOC kemudian memindahkan pos perdagangan dari Jambi ke pantai Barat Sumatera, terutama Padang dan Bengkulu.

Tujuh di antara kesembilan naskah dari abad ke-18 ditulis di antara tahun 1776 hingga 1794, tepatnya di masa pemerintahan Sultan Jambi Pangeran Temenggung Mangku Negara.

Menjelang akhir abad ke-18 masa suram Jambi tetap berlanjut. Setelah kepergian Belanda, hanya sedikit yang diketahui tentang perkembangan Jambi di masa berikutnya. Namun kita tahu bahwa setelah VOC meninggalkan Jambi, penguasa ilir sekali lagi berusaha memperkuat pengaruhnya di Kerinci dengan harapan agar Kerinci jangan mengakui Raja Minangkabau, dan supaya masyarakat Kerinci menerima ajaran Islam.

Enam naskah bertanggal tiba di Kerinci antara tahun 1776 dan 1778 M: TK 148 dan 230 mengumumkan bahwa Pangeran Temenggung Mangkunegara meninggal pada tanggal 21 Mei 1776.

TK 148 melanjutkan bahwa “Maka sekarang ini aku [...] lah raja kamu akan ganti paduka ayahanda” dengan peringatan agar rakyat mematuhi sumpah setia serta “mendirikan syara’ dan adat” dan agar jangan setia kepada raja Minangkabau: “Jikalau mengadap ke Raja Benangkebau kena kutuk bisa kawi”.

Penulis surat itu adalah Pangeran Sukarta Negara. Sayang kita tidak tahu siapa pangeran tersebut, tetapi kemungkinan besar seorang anggota keluarga Sultan Jambi. Di dalam surat-suratnya Pangeran Sukarta berusaha untuk menghidupkan kembali hubungan antara Jambi dengan Kerinci dengan mengangkat sejumlah Depati. Ia juga mengimbau para Depati Kerinci untuk tidak lagi mengakui raja Minangkabau. Namun, hal yang ternyata paling penting baginya berkaitan dengan agama.

Pangeran Sukarta mendesak para Dipati Kerinci untuk menegakkan agama Islam dan syariah. Dari catatan Inggris dan Belanda kita tahu bahwa sekitar pertengahan abad ke-18 Islam mulai diinterpretasikan dengan lebih ketat di Jambi (Andaya 1993, hlm. 67).

TK 230 dialamatkan kepada Dipati Sanggaran Agung, Dipati Empat Helai Kain, dan Dipati Selapan Helai Kain, yang semuanya terletak di dataran tinggi Kerinci. Surat ini mengandung pesan agar rakyat Kerinci jangan “makan tuak dan arak”, jangan berzinah, dan jangan “menyembah batang batu segala berhala” dan jangan menguburkan “jenazah dengan gendang serunai dan bedil”.

Minuman haram yang dimaksud adalah tuak dan arak. Tuak dibuat dari air nira yang disadap dari pohon enau (*Arenga Pinnata*) yang tumbuh di mana-mana di Kerinci. Untuk sebagian orang Islam konsumsi minuman beralkohol tidak dilarang asal jangan sampai mabuk, tetapi Pangeran Sukarta ingin mengharamkannya sama sekali. Sementara dari kitab undang-undang TK 215 kita tahu bahwa sebelumnya konsumsi tuak tidak dianggap haram.

Selain TK 148 dan TK 230, Pangeran Sukarta Negara menulis empat surat lagi kepada para Dipati di Kerinci. Semuanya ditulis pada tahun 1192 H/1778 M (TK 3, 4, 13, 231). Melalui surat-surat ini Pangeran Sukarta Negara, yang diduga sebagai pengganti Pangeran Temenggung Mangkunegara, melantik sejumlah depati dan melengkapi mereka dengan “hukum dan cap”.

Di dalam surat TK 3 Pangeran Sukarta Negara mengancam akan menjatuhkan hukuman mati bukan hanya kepada pemberontak, perampok, penipu, peracun, petarung di malam hari, dan penipu (*daga-dagi dan sanduk-samun, umuk-umbai, upas-racun, telum-tikam malam, kincung-kicuh, sekalian itu mati hukumnya*), tetapi juga kepada mereka yang “sumbang salah” serta yang “berzina laki-laki dengan perempuan”. Dalam surat TK 231 bertanggal 21 Juli 1778 Pangeran Sukarta juga mengimbau masyarakat Kerinci untuk menegakkan hukum Islam:

Pangeran minta kembangkan kepada kamu sekalian syara’ Rasul Allah salla llahu ‘alaihi wasallam. Mufakatlah kamu dengan segala [...] yang di dalam ‘alam Kerinci mendirikan agama Rasul Allah salla llahu ‘alaihi wasallam dan seboleholehnya buangkan kamu barang yang mungkir. [...] Adalah umur dunia ini tiadalah akan berapa lama lagi. Sebaik-baiknya kamu dirikan ugama yang sebenarnya.

Di dalam piagam TK 13 Pangeran Sukarta Negara mengangkat sejumlah depati, menetapkan batas wilayah, dan mendesak mereka untuk mematuhi hukum Islam dengan memperhatikan empat hal:

Pertama jikalau kematian jangan diarak dengan gendang, gong, serunai dan bedil dan kedua jangan laki-laki bercampur dengan perempuan bertauh nyanyi dan jangan bersalah dan memuja hantu dan syetan dan batu kayu dan barang sebagainya dan ketiga jangan menikahkan perempuan dengan tiada walinya.

Pesan keempat ternyata terlupakan sehingga beliau menambahnya di TK 4:

Keempat jangan makan minum yang haram dan barang sebagainya daripada segala yang tiada diharuskan syarak. Hubaya-hubaya jangan dikerjakan!!

Sebagaimana terlihat di atas, Pangeran Sukarta Negara menekankan pentingnya mematuhi hukum Islam. Semenjak kedatangan Islam di Nusantara pada abad ke-14 dan ke-15 syariah kurang diperhatikan di dalam undang-undang kesultanan Melayu. Baru pada abad ke-17, seiring dengan kedatangan sufisme reformasi maka segi syariah lebih diamati. Menurut ulama Syekh Ahmad al-Faruqi Al-Hanafî Al-Sirhindi (1564–1624 M) dari Tarekat Naqshabandiyah “Raja adalah jiwa dan masyarakat adalah tubuh. Jika sang Raja tersesat, rakyat akan ikut tersesat” sehingga sang raja bertanggung jawab untuk mengabdikan dirinya menuju pemulihan iman murni dan penyebaran ajaran Nabi (Andaya dan Ishii 1999, hlm. 195).

Dengan kedatangan aliran Sufi yang terpengaruh Tarekat Naqsyabandiyah pada pertengahan abad ke-18, mungkin tulisan-tulisan pra-Islam tidak lagi dianggap sebagai sumber pengetahuan yang relevan, dan lambat-laun menghilang. Kecuali naskah TK 214 yang hingga kini masih dilestarikan oleh penduduk Tanjung Tanah.

Tanah pertemuan raja antara Jambi dengan Inderapura

Pada akhir abad ke-18 Jambi Ilir menjadi semakin miskin dan secara politik dikuasai oleh Minangkabau. Bahkan Jambi tidak bisa memilih Sultannya tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Raja Minangkabau. Para pedagang asal Nusantara maupun luar negeri semakin jarang berlabuh di Jambi. Ditinjau dari sudut pandang orang Eropa, Jambi malah dikatakan tidak menegakkan hukum ataupun pemerintahan dan Sultannya tidak hanya lemah tetapi juga tidak terlalu menghiraukan keadaannya (Locher-Scholten 2004, hlm. 40–44). Keadaan juga tidak membaik di abad ke-19 dengan ada kerusuhan 1811 yang berlangsung selama bertahun-tahun (Locher-Scholten 2004, hlm. 41).

Kesultanan Inderapura merupakan sebuah kerajaan yang masih termasuk wilayah rantau Alam Minangkabau (kini menjadi Provinsi Sumatera Barat), berbatasan dengan Kerajaan Muko-Muko (Prov. Bengkulu) dan Kerajaan Malayu Jambi (Prov. Jambi). Sebagian wilayah Kerajaan Inderapura jatuh di dalam Kabupaten Pesisir Barat (Prov. Sumatera Barat).

Sebagian besar Kerinci terletak di dataran tinggi, khususnya di dalam lembah Kerinci yang sungainya mengalir ke Selat Melaka. Kerinci berbatasan langsung dengan Inderapura, tetapi kedua wilayah terpisah oleh pegunungan Bukit Barisan yang tertutup dengan hutan rimba. Jarak antara Kota Tapan dengan Kota Sungai Penuh, kota terbesar Kerinci, sekitar 60 km.

Secara resmi kerajaan ini pernah menjadi vasal Kerajaan Pagaruyung (Minangkabau), meskipun pada kenyataannya Inderapura berdiri sendiri serta bebas

mengatur urusan dalam dan luar negerinya. Dulu kerajaan ini bernama Jayapura, akan tetapi dengan kedatangan Islam pada abad ke-16 namanya berubah menjadi Kesultanan Inderapura, dan pusat kerajaan berpindah dari Teluk Air Manis ke istana Muara Betung (Voorhoeve 1942; Deki Syaputra 2020).

TK 44 bertanggal 1819 M. Setelah tahun ini tidak ada lagi surat dari Jambi yang dikirim ke Kerinci. Sultan Jambi masih tetap menganggap Kerinci sebagai bagian daripada wilayahnya, tetapi tidak ada lagi hubungan antara Jambi dan Kerinci yang disebabkan oleh keadaan politik di Jambi yang diuraikan dalam bab berikut.

Para Bupati Kerinci masih tetap menerima surat serta piagam dari pesisir, tetapi suratnya tidak lagi datang dari Jambi di pantai timur melainkan dari Inderapura di pantai barat. Misalnya TK 140 dan 141 yang bertarikh 1246 H/1831 M, TK 88 (1290 H/1873 M), serta TK 86 dan 87 (1305 H/1888 M). Selain kelima naskah bertanggal, ada pula sejumlah naskah yang tidak bertanggal, yaitu TK 43, 49, 111 dan 204. Keempat naskah ini juga berasal dari Inderapura dan kemungkinan bertanggal sesudah tahun 1819 M.

Tampaknya TK 140 menandai tahunnya (1831 M) Kerinci mulai berada di bawah kekuasaan Inderapura. Naskah ini bermula dengan perkataan: “Fasal pada menyatakan patuturan dan pakaunan Yang Dipertuan Inderapura dengan Kerinci”, tetapi isinya hanya mengandung sebuah cerita tentang hubungan Kerinci dengan Inderapura. Dikatakan bahwa Inderapura tidak pernah mengetahui ada negeri Kerinci sampai akhirnya ada utusan dari Kerinci menghadap Sultan Inderapura.

Titah Yang Dipertuan: “Apa namamu dan dari mana kamu datang?” Jawabnya: “Aku datang dari sebelah Gunung Barisan nama Kurinci, nama aku Raja Berkilat, [...]” Titah Yang Dipertuan: “Adakah negeri di sebelah Gunung Barisan ini?” Jawab Raja Berkilat: “Ada, Yang Dipertuan.” Titah Yang Dipertuan: “Kalau begitu, marilah kita membuat sumpah setio supaya negeri kamu itu dengan negeri aku ini menjadi satu.” [...] Siapalah yang mengarang sumpah setio? Ialah Pangeran Kebaru di Bukit, datang dari Jambi. Jadi empatlah orang yang bersumpah: Pertama Yang Dipertuan Berdarah Putih, kedua Raja Muda, ketiga Dipati Rantau Telang, keempat Pangeran Kebaru di Bukit. Maka jadilah tanah Kerinci tanah menang, yaitu tanah pertemuan raja antara Sultan Jambi dengan Sultan Inderapura. Jika menghadap ia ke hilir jadilah beraja ke Jambi. Jika menghadap ia ke barat, ialah ke tanah Inderapura.

Tampaknya seolah-olah baru pada abad ke-19 terjadi ‘pertemuan’ antara Kerinci dengan Inderapura, namun dari Arsip Kolonial Belanda KA 1158, OB, kita mengetahui bahwa sebuah perjanjian perihal membeli emas ditandatangani pada 12 Syawal 1076 H (17 April 1666) antara 12 Adipati Kerinci sebagai pihak yang satu dan VOC serta Raja Minangkabau di pihak yang satu lagi (Kathirithamby-Wells 1976, hlm. 76). Dalam perjanjian disebut bahwa, “Pada suatu saat selama Sumatera dikuasai Inggris setiap tahun dibawa 10.000 tahlil (400 kg) emas dari Kerinci ke Muko-Muko” (Znoj 1998, hlm. 103). Menurut Znoj, emas tersebut kemungkinan besar berasal dari pertambangan emas di Pangkalan Jambu (Kab. Merangin) dan dibawa melalui Kerinci ke pelabuhan Muko-Muko di Inderapura.

Berdasarkan naskah yang dialihaksarakan oleh Voorhoeve (1941) di dalam Tambo Kerinci, terlihat bahwa ada masa hubungan antara Jambi dengan Kerinci yang erat, dan ada juga waktu dengan sedikit hubungan antara kedua daerah tersebut. Tetapi mengapa

justru pada pertengahan abad ke-17 yang dikenal sebagai Zaman Keemasan Jambi tidak ada naskah yang dikirim dari Jambi ke Kerinci?

Pada waktu itu, sekitar 1610 hingga 1680 Jambi menjadi kaya raya sebagai salah satu daerah penghasil lada terbesar di Nusantara. Pada waktu itu Kerinci pun sudah terlibat dalam perdagangan lada (Colombijn 2003, hal. 519). Apakah tidak ada surat dari abad ke-17 karena kertas di daerah tropis jarang bertahan lebih dari 300 tahun? Sepertinya itu pun bukan jawaban yang tepat karena cukup banyak surat dari awal abad ke-18 yang masih bertahan hingga sekarang.

Berakhirnya zaman pernaskahan selama zaman kolonial

Naskah bertanggal yang terbaru adalah TK 44, sebuah piagam yang dikeluarkan oleh Pangeran Citra Puspa Jaya dan yang diuntukkan kepada Depati Sungai Laga pada tahun 1234 H (1819 M). Mengapa di zaman keemasan Jambi tidak ada sepucuk surat pun yang dikirim ke Kerinci, menjadi misteri. Mengapa setelah 1819 tidak ada lagi surat dari Jambi mudah untuk dijawab. Pada saat itu hubungan Jambi dengan Kerinci hampir putus.

Charles Campbell, pegawai kongsi dagang *British East India Company*, menjadi orang Eropa pertama yang menjejaki Bumi Kerinci pada awal abad ke-19. Lalu disusul oleh ekspedisi penelitian yang dipimpin warga Inggris Thomas Barnes tahun 1818. Pada paruh pertama abad ke-19 Belanda tidak berminat menjajah Kerinci karena kebijakan tidak campur tangan (*Onthoudingspolitiek*) dan juga karena Kerinci kurang kaya akan hasil bumi. Hal itu berubah menjelang akhir abad ke-19 ketika Belanda menjalankan kebijakan *Pax Neerlandica* dengan tujuan untuk menyatukan wilayah-wilayahnya melalui perjanjian dan pendekatan militer. Namun Belanda menunggu setelah semua kerajaan di sekitarnya, Indragiri, Inderapura, Muko-Muko, Minangkabau dan Jambi ditaklukkan dan baru 1903 Kerinci secara resmi menjadi bagian dari Hindia-Belanda.

Jambi sudah terlebih dahulu jatuh dalam genggaman Belanda, tetapi tidak secara langsung karena Belanda pada saat itu tidak berminat untuk memperluas wilayah Hindia-Belanda. Sejak VOC meninggalkan Jambi tahun 1679 hanya ada sedikit hubungan antara Jambi dengan pihak Belanda. Selama masa jabatan Van den Bosch (Gubernur Jenderal 1830–1834; Menteri Urusan Tanah Jajahan 1834–1839), Belanda menginginkan agar negeri-negeri di Sumatera berada di bawah pengaruh Batavia, tetapi tidak menguasainya secara langsung. Bosch juga hendak meningkatkan dan mengontrol perdagangan di Sumatera.

1829 Residen Palembang F. C. E. Praetorius mendekati Sultan Jambi meminta bantuan untuk memberantas komunitas sekitar 1000–1500 pembajak laut yang menetap di muara Batang Hari. Namun sang Sultan saat itu menetap di Jambi Ulu membantu Pagaruyung memerangi kaum Paderi. Upaya Belanda untuk bekerjasama dengan Sultan Jambi Facharuddin (1833 – 1844) disambut dengan baik, namun oleh sebab yang tidak begitu jelas berakhir dengan perang di daerah Rawas yang berlangsung Juli hingga Agustus 1833 dan Sultan Facharuddin dipaksa menandatangani pernyataan bahwa ia mengakui kedaulatan Kolonial Belanda di Jambi. Ia menerima sejumlah uang tetapi harus berjanji untuk mengizinkan Belanda mengoperasikan kembali benteng di Muara Kumpeh dan mengutip pajak atas barang impor dan ekspor (Locher-Scholten 2004, hlm. 65–73).

Berbeda dari penguasa sebelumnya, Sultan Taha menolak keras perjanjian dengan Belanda. Akibatnya, Belanda marah dan melayangkan serangan pada 1858, hingga berhasil menguasai istana.

Sejak 1850 dan hingga kira-kira tahun 1870 Belanda menerapkan kebijaksanaan politik tidak campur tangan pada urusan pribumi di seluruh wilayah Hindia-Belanda di luar Jawa dan Maluku yang pada hakikatnya adalah kelanjutan kebijakan yang sudah diterapkan oleh Van der Bosch. Menteri Urusan Tanah Jajahan J. C. Baud (1840-48) menulis pada tahun 1841 bahwa “gagasan untuk menaklukkan Sumatera tidak perlu dilupakan, namun sebaiknya dilaksanakan dalam kurun waktu seratus dan bukan dua puluh lima tahun” (dikutip dari Locher-Scholten 2004, hlm. 94).

Kebijakan tidak campur tangan dan sekaligus meningkatkan kerja sama dengan penguasa setempat dari awal sudah bermasalah karena keduanya saling bertentangan. Karena tetap rugi di Jambi dan juga demi menerapkan kebijakan baru Belanda mempertimbangkan untuk menutup Muara Kompeh.

Setelah wafatnya Sultan Facharuddin Januari 1841 ia diganti oleh Pangeran Ratu Abdurachman Nazaruddin. Raden Tabun yang sudah disingkirkan ketika Facharuddin dinobatkan, kini sekali lagi tidak dihiraukan. Oleh sebab itu pergolakan antara Sultan Mohammad Facharuddin dan Raden Tabun terus terjadi hingga akhir tahun 1840-an.

Tahun 1855 Taha Saifuddin, anak Sultan Muhammad Facharuddin, dinobatkan sebagai Sultan Jambi. Sebagaimana diwajibkan berdasarkan perjanjian dengan Belanda ia memberitahu penobatannya kepada pemerintah di Batavia. Selama dua tahun tidak ada balasan dari pihak Belanda. Tahun 1857 Belanda memberitahu Jambi bahwa perjanjian yang lama perlu diperbarui. Taha menolak perjanjian baru dengan alasan bahwa selama ini perjanjian tahun 1834 tidak pernah dilanggar. Taha lalu meminta bantuan dari Kerajaan Utsmaniyah namun tidak pernah menerima balasan. Belanda menolak gagasan Taha untuk tetap menggunakan perjanjian 1834 dan pada 2 September 1858 memberi dia ultimatum untuk menandatangani perjanjian yang baru. Setelah segala perundingan gagal maka pada 6 September Belanda menyerang keraton Jambi yang jatuh ke tangan Belanda. Namun Taha dengan rombongannya sudah terlebih dahulu melarikan diri ke Jambi Ulu.

Sultan Ahmad Nazaruddin menandatangani perjanjian baru pada November 1858 yang mengakibatkan Jambi menjadi bagian dari Hindia-Belanda. Mulai 1858 ada wakil Belanda yang tetap di Jambi dan sepuluh tahun kemudian sudah ada tujuh puluh serdadu KNIL di Jambi, 16 di antaranya orang Eropa (Locher-Scholten 2004, hlm. 134) sementara Sultan Ahmad Nazaruddin menetap di Dusun Tengah, empat hari perjalanan dari Jambi, dan sang Pangeran Ratu tinggal lebih jauh lagi di Teluk Puan (Muara Tabir, Tebo). Sementara Sultan Taha menetap di Teluk Rendah (Tebo) sejauh 10 hari dari ibu kota. Tetap dihormati oleh rakyat, Taha masih memerintah di Jambi Ulu.



Gambar 3. Kediaman Sultan Jambi Ahmad Nazaruddin di Dusun Tengah⁶

Tahun 1866 Sultan Nazaruddin meminta kepada Belanda agar Belanda memaafkan Sultan Taha. Ternyata surat tersebut tidak sampai pada Residen J. A. W. van Ophuijsen (1861-63 dan 1867-70) karena sedang berada di Belanda untuk cuti sakit sehingga permintaannya tidak pernah dipertimbangkan. Hingga kira-kira 1870 hanya Residen van Ophuijsen yang pernah berkunjung ke Jambi Hilir sehingga Belanda kurang mengetahui keadaan di Jambi Hilir dan Kerinci.

Untuk mengetahui lebih banyak tentang Jambi dan jalur transportasi maka tahun 1877–1879 Belanda mengadakan ekspedisi penelitian di Jambi antara lain untuk mengetahui apakah batu bara yang ditambang di Ombilin dekat Sawahlunto, Sumatera Barat dapat dikirim ke Jambi melalui Batang Hari. Ekspedisi tersebut dapat perlawanan dari penduduk dan dianggap tidak terlalu berhasil. Keresahan yang terjadi di Jambi menunjukkan bahwa Belanda kurang bisa membaca sentimen masyarakat, dan juga kurang mengetahui hubungan antara rakyat dan penguasa yang serba berbeda dengan keadaan di Eropa. Oleh sebab itu Belanda mempertimbangkan strategi ganda: merangkul Sultan Taha dengan tujuan agar ia takluk pada Belanda, dan meningkatkan administrasi dan mempersiapkan ekspedisi militer (Locher-Scholten 2004, hlm. 155). Namun pemerintah kolonial enggan melibatkan tentara selagi Perang Aceh masih berkecamuk.

Sesudah 1890 Jambi menjadi lebih penting bagi Belanda karena ditemukannya minyak bumi. Pada saat yang sama kebijakan tidak campur tangan (Onthoudingspolitiek) diganti dengan kebijakan Pax Neerlandica dengan tujuan untuk menyatukan wilayah-wilayahnya melalui perjanjian dan pendekatan militer. Jambi ditaklukkan melalui serangkaian ekspedisi militer yang berlangsung antara 1901 hingga 1907. Nasib yang serupa juga menimpa Kerinci. Namun, berkat letak geografisnya di dalam sebuah lembah yang dikelilingi gunung maka Kerinci jarang diperhatikan oleh penguasa Eropa.

Tidak banyak orang Eropa pernah menginjakkan kakinya di Kerinci—hanya sejumlah kecil pedagang naik ke Kerinci pada tahun 1803, 1811, 1833, dan 1838. Tahun 1840 ditandatangani perjanjian persahabatan antara utusan Pieter Merkus yang 1841–1844 menjadi Gubernur-Jenderal Hindia Belanda dengan para Depati di Kerinci. Antara lain dijanjikan untuk meningkatkan perdagangan antara kedua

6 Sumber gambar dari D. D. Veth, *Midden-Sumatra: Reizen en onderzoekingen der Sumatra-expeditie, uiterust door het Aardrijkskundig Genootschap: Photographie-album* (Leiden: Brill, 1879); foto koleksi KITLV 7142]

belah pihak. Namun baru pada tahun 1865 Kerinci disebut di dalam Koloniaal Verslag (laporan tahunan pemerintah kolonial) berkaitan dengan kopi asal Kerinci yang dijual di pasar-pasar di Bengkulu dan juga karena Kerinci mulai menanam tembakau (Locher-Scholten 2004, hlm. 143).

Tahun 1902 Belanda mengetahui bahwa para pemberontak dari Jambi mencari perlindungan di Kerinci. Para Depati Kerinci ditegur agar senantiasa bersikap netral. Mereka juga diberitahu bahwa Belanda akan menempatkan seorang Kontrolir di Kerinci sebagai ‘penasehat’. Karena para Depati menolak permintaan Belanda, maka impor segala barang ke Kerinci diberhentikan dan penduduk dilarang meninggalkan wilayahnya. Para depati mengajukan protes kepada Belanda, akan tetapi suratnya tidak sampai kepada Belanda karena pengantar surat tersebut dibunuh di Lempur.

Setelah kejadian tersebut maka semua jalan yang masuk ke Kerinci ditutup, dan antara Mei dan September 1903 tentara Belanda berhasil menaklukkan Kerinci dan menjadikannya bagian dari Hindia Belanda. Namun mereka tidak menduga akan mendapatkan perlawanan yang begitu hebat. Belanda membalas dengan sangat brutal, antara lain dengan menembak anak-anak dan perempuan dan membakar kampung sehingga tindakan kejam tentara KNIL malah dikemukakan oleh anggota parlemen Belanda. Setelah selama ratusan tahun berada di bawah kekuasaan Jambi, Indrapura, dan Minangkabau, Kerinci akhirnya ditaklukkan oleh Belanda dan kehilangan kemerdekaannya yang selama ini tetap dapat dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Rahman. *Sejarah dan tamadun Asia Tenggara sebelum dan sesudah pengaruh Islam*. Kuala Lumpur: Utusan. 2000.
- Adelaar, Alexander. “Who were the first Malagasy, and what did they speak?” In Acri, Andrea, Blench, Roger and Landmann, Alexandra. *Spirits and Ships: Cultural Transfers in Early Monsoon Asia*. Singapore: ISEAS Publishing. 2017.
- Ahmad, A. Samad. *Hikayat Amir Hamzah*. diselenggarakan oleh A. Samad Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1987.
- Al-Attas, Naquib. *Preliminary statement on a general theory of the Islamization of the Malay-Indonesian archipelago*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1969.
- Andaya, B. W. *To live as brothers: Southeast Sumatra in the seventeenth and eighteenth centuries*. Honolulu: University of Hawaii Press. 1993.
- Andaya, Barbara Watson, dan Yoneo Ishii. “Religious Developments in Southeast Asia, c. 1500-1800”. Nicholas Tarling (ed.). *The Cambridge history of Southeast Asia*. Vol. 2. From c. 1500 to c. 1800, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid: Cambridge University Press. 1999
- Azra, Azyumardi. “1530–1670: A Race between Islam and Christianity?” Karel Steenbrink dan Jan S. Aritonang, *A History of Christianity in Indonesia*. *Studies in Christian Mission* 35, (2008): 9–21.
- Blagden, C.O. “Two Malay letters from Ternate in the Moluccas, written in 1521 and 1522.” *Bulletin of the School of Oriental Studies* 6, (1930): 87–101.
- Braginsky, Vladimir. *The heritage of traditional Malay literature: a historical survey of genres, writings and literary views*. Leiden: KITLV. 2004.

- Casparis, J. G. de. *Prasasti Indonesia, II, selected inscriptions from the 7th to the 9th century A.D.* Bandung: Masa Baru. 1956.
- Casparis, J. G. de. *Indonesian palaeography: a history of writing in Indonesia from the beginnings to c. A.D. 1500.* Leiden: E.J. Brill. 1975.
- Casparis, J. G. de. 1980. "Ahmat Majanu's Tombstone at Pengkalan Kempas and its Kawi Inscription". *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 53, No. 1 (237): 1–22.
- Casparis, J. G. de. "Peranan Adityawarman, putera Melayu di Asia Tenggara". Ismail Hussein, Aziz Deraman, and Abdul Rahman al-Ahmadi (peny.) *Tamadun Melayu* (3). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia (1989): 918–943.
- Colombijn, Freek. *Volatile State in Southeast Asia: Evidence from Sumatra, 1600-1800.* Ann Arbor: White Lotus Press. 2003.
- ZE, Deki Syaputra. "Tradisi surat menyurat Sultan Indrapura dengan Depati Kerinci". *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 6, no. 1 (2020): 55–77.
- ZE, Deki Syaputra. "Ritus dan manuskrip: Analisis Korelasi Naskah dengan Kenduri Sko di Kerinci" *Hadharah: Jurnal Keislaman dan Peradaban* 13, (2019): 79–101.
- Taim, Eka Asih Putrina. "Pulau Sawah: The Oldest Ancient Shrine from Hindu Buddha Period in Upstream Batanghari River West Sumatera". Proceedings of the Sixth International Conference on Language, Literature, Culture, and Education (ICOLLITE 2022). Amsterdam: Atlantis Press, 2022: 162–171.
- Yahya, Farouk & Jones, Russell. "Malay manuscripts: a guide to paper and watermarks. The collected.
- Friedrich, R. "Iets over het schrift der Malejers," *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* 25, no. 2 (1854): 470-479.
- Gallop, Annabel Teh. "Piagam Serampas: Malay Documents from Highland Jambi," dalam Dominik Bonatz, John Miksic, J. David Neidel, Mai Lin Tjoa-Bonatz (peny). *From Distant Tales: Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatra.* Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2009.
- Griffiths, Arlo. "Inscriptions of Sumatra, IV: An Epitaph from Pananggahan (Barus, North Sumatra) and a Poem from Lubuk Layang (Pasaman, West Sumatra)," *Archipel* 100, (2020): 55–68.
- Sunliensyar, Hafiful Hadi. "Surat-surat kerajaan untuk penguasa kerinci: tinjauan terhadap naskah Cod. Or. 12.326 koleksi Perpustakaan Universitas Leiden," *Jumantara* 10, No. 2 (2019): 163–180.
- Sunliensyar, Hafiful Hadi. "Empat naskah Surat Incung pada tanduk kerbau dari Mendapo Rawang, Kerinci: suntingan teks dan terjemahan," *Jumantara* 11, No.2 (2020): 79-96.
- Hassan, Hamdan (peny.). *Surat al-Anbiya'*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1992.
- Jackson, Beverley and Elsbeth Locher-Scholten. *Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism, 1830–1907.* Ithaca: Cornell University Press. 2018.

- Jákl, Jiří. ‘The Folding Book Format (Concertina) in Pre-Islamic Java: Revisiting the Old Javanese Term *Ləpihan*,’ *Bulletin de l’École Française d’Extrême-Orient* 102, (2016): 165–94.
- Jones, Russell. “The origins of the Malay manuscript tradition. Cultural contact and textual interpretation”. C. D. Grijns, and S. O. Robson,” *Papers from the fourth European Colloquium on Malay and Indonesian Studies, held in Leiden in 1983*. Dordrecht/Cinnaminson: Foris, 1986: 121–143.
- Kathirithamby-Wells, J. “The Inderapura Sultanate: The Foundations of its Rise and Decline, from the Sixteenth to Eighteenth Centuries,” *Indonesia* 21, Cornell University Southeast Asia Program, 1976: 65–84.
- Kempe, J.E. dan R.O. Winstedt. “A Malay Legal Digest”. *JMBRAS* 21, Part 1. 1948.
- Kern, Johan Hendrik Caspar. “De wij-inscriptie op het Amoghapāṣa-beeld van Padang Candi (Midden Sumatra); 1269 Çaka,” *Prof H. Kern: Verspreide Geschriften. Sevende Deel. Inscripties van den Indischen Archipel, slot de Nagarakrtagama, eerste gedeelte*. ’S-Gravenhage: Martinus Nijhoff. 1917.
- Kozok, Uli. *Kitab undang-undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu yang tertua*. Jakarta: Yayasan Naskah Nusantara/Yayasan Obor Indonesia. 2006.
- Kozok, Uli. *A 14th Century Malay Code of Laws: The Nītisārasamuccaya*. (with contributions by Thomas Hunter, Waruno Mahdi and John Miksic). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 2015.
- Kozok, Uli. “Kitab undang-undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu yang tertua”. *Jumantara* 14, No. 2 (2023): 235–264.
- Kozok, Uli and Eric van Reijn. “Adityawarman: three inscriptions of the Sumatran king of all supreme kings,” *Indonesia and the Malay World* 38 (110), (2010): 135–158.
- Kratz, E. Ulrich. “Jawi spelling and orthography: a brief review,” *Indonesia and the Malay World* 30 (86), (2002): 21–26.
- Liaw, Yock Fang. *Undang-undang Melaka = The laws of Melaka*. Series: Bibliotheca Indonesica 13. The Hague: Martinus Nijhoff. 1976.
- Locher-Scholten, Elsbeth. “Rivals and rituals in Jambi, South Sumatra (1858-1901),” *Modern Asian Studies* 27, No. 3 (1993): 573–591.
- Locher-Scholten, Elsbeth. *Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism 1830–1907*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program Publications. 2004.
- Marlow, Louise. *Hierarchy and Egalitarianism in Islamic Thought*. Cambridge University Press. 1997.
- Miksic, John N. “Recent Research in the Southeast Sumatran Region”. Museum of Underwater Archaeology. 2011.
<http://www.themua.org/collections/files/original/bec2c1bcdd132c0d728bed38f5415770.pdf>
- Molen, Willem van der. “The Syair of Minye Tujuh”, *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 163, No. 2/3 (2007): 356–375.
- Nik Hassan Shuhaimi bin Nik Abdul Rahman. “Pre-Modern Cities in the Malay Peninsula and Sumatera”. *Jurnal Arkeologi Malaysia* 6, (1993).
- Oendang-oendang Simboer Tjahaja: jaitoe oendang-oendang jang ditoeroet didalam hoeloean Negeri Palembang. Palembang: Merde. 1939.

- Ophuijsen, C.A. van. "Uitgave der oendang-oendang Djambi. Eenige opmerkingen naar aanleiding van de door Prof. Mr. L. W. C. van den Berg bezorgde uitgave van de oendang-oendang Djambi," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië* 46, No. 2 (1896): 153–213.
- Perret, Daniel, Heddy Surachman & Repelita Wahyu Oetomo. "Recent Archaeological Surveys in the Northern Half of Sumatra," *Archipel* 100, (2020): 27–54.
- Ras, J. J. *Hikajat Bandjar. A study in Malay historiography*. The Hague: Martinus Nijhoff. 1968.
- Schrieke, B.J.O. *Indonesian Sociological Studies*. 2 parts. The Hague/Bandung: W. van Hoeve. 1955–1957
- Sham, Abu Hassan, dan Mariyam Salim. *Sastera undang-undang*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1995.
- Slamet Muljana. *Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi*. Jakarta: Yayasan Idayu. 1981.
- Takasusu, Junjirō. *An Introduction to I-tsings's Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago (A.D. 671 - 695)*. Oxford. 1896.
- Teuku Iskandar (ed.). "De Hikajat Atjéh," *Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde* 26. 's-Gravenhage: Nijhoff. 1958.
- Teeuw, A. "The history of the Malay language: a preliminary survey," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 115, (1959): 138–156.
- Tjoa-Bonatz, Mai-Lin. "A View from the Highlands: Archaeology and Settlement History of West Sumatra, Indonesia", Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute. 2019.
- Veth, Pieter Johannes. *Aardrijkskundige beschrijving van Midden-Sumatra: met atlas*. Aardrijkskundig Genootschap. Leiden: Brill. 1882.
- Voorhoeve, Petrus. "Tambo Kerintji. Disalin dari Toelisan Djawa Koeno, Toelisan Rentjong dan Toelisan Melajoe jang Terdapat pada Tandoek Kerbau, Daoen Lontar, Boeloeh dan Kertas dan Koelit Kajoe, Poesaka Simpanan Orang Kerintji," [stensilan]. 1941.
- Watson, C.W. "Historical documents from Sungai Tutung, Kerinci," *Masyarakat Indonesia* 3, (1976): 35–49.
- Wilkinson, R. J. *A Malay-English dictionary*. London: Macmillan. 1959.
- Yosef Ibrahim. *HUT Dusun Kumun yang ke-329 tanggal 21 Mei 2014*. <https://kumunkarantak.blogspot.com>